

DISERTASI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN BARAT
DAN TIMUR INDONESIA**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND
MINIMUM WAGES ON IMPROVING THE QUALITY
OF HUMAN DEVELOPMENT IN THE WEST
AND EAST INDONESIA***

ABDUL RAHMAN



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN BARAT
DAN TIMUR INDONESIA**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND
MINIMUM WAGES ON IMPROVING THE QUALITY
OF HUMAN DEVELOPMENT IN THE WEST
AND EAST INDONESIA***

ABDUL RAHMAN

A 0131191001



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

disusun dan diajukan oleh:

ABDUL RAHMAN
A013191001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal 2 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor


Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A.
NIP : 196607171991032001

Copromotor I


Dr. Abd Rahman Razak, SE., M.S
NIP: 19631231199021001

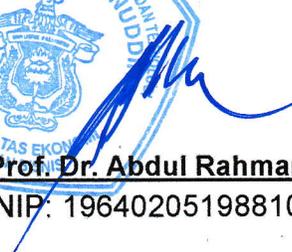
Copromotor II


Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E. M.A
NIP: 19630516199003001

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si
NIP: 196012311988111002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. CIPM
NIP: 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Abdul Rahman
NIM : A013191001
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi berjudul:

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Abdul Rahman

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang memegang setiap kejadian, mengangkat setiap kemuliaan, penyempurna dari setiap kebahagiaan umat manusia, pelimpah rahmat dan karuniaNya. Salam dan Salawat semoga senantiasa menyelimuti Baginda Rasulullah tercinta, keluarga, serta sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan konsisten pada ajaran-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi yang berjudul ***“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Timur Indonesia”***.

Gagasan yang melandasi topik ini dari hasil pengamatan penulis terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia masih terjadi ketimpangan antara di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Penulis bermaksud memberikan kontribusi pemikiran terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui kebijakan pemerintah yang tercermin dari alokasi belanja (belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) dan kebijakan penetapan upah minimum provinsi.

Dalam perjalanan penyelesaian studi program Doktor khususnya proses penyusunan disertasi ini, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, tetapi semuanya dapat diatasi dengan bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada: Ibu Prof Dr. Nursini, S.E., MA Guru besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sebagai Promotor. Beliau yang memiliki kemampuan kegigihan, kepiawaian, dan kecerdasan dalam ilmu ekonomi, kuantitatif, serta dengan wawasan berpikir, kearifan beliau

sebagai ilmuan, sehingga proses pembimbingan hampir meminimalkan kendala yang dihadapi. Keterbukaan beliau berpeluang tidak ada batas waktu dan ruang dalam proses bimbingan, semua berjalan dengan lancar dan efektif, serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan tepat waktu.

Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, S.E., MS. Doktor dalam Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin selaku Co-Promotor 1. Dengan kegigihan dan kesabaran, kecerdasan dalam ilmu ekonomi dan kuantitatif, wawasan berpikir, dan kearifan beliau sebagai ilmuan banyak pengarahan positif sehingga dalam proses pembimbingan mengurangi kendala yang dihadapi. Keterbukaan beliau dalam pengarahan untuk perbaikan tidak ada batas waktu dan ruang, semua berjalan lancar serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, memacu penulis untuk merampungkan tepat waktu.

Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, M.A, Doktor dalam Ilmu Ekonomi, khususnya dalam Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin selaku Co-Promotor II. Meski kesibukan beliau saat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Program studi S3 Ilmu Ekonomi dan sekarang Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tidak mengurangi sedikitpun ruang dan waktu untuk penulis dalam proses konsultasi. Di sela-sela kesibukan beliau tetap menyempatkan waktunya untuk memberikan perhatian dan membimbing penulis dengan penuh bijak dan motivasi yang tinggi, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S3, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Rektor UNHAS periode 2014 – 2022 dan Prof Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc Rektor UNHAS periode 2022 – 2025. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP., beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A. sebagai mantan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS atas bimbingan dan arahan selama penulis menjalani proses pendidikan doktor Ilmu Ekonomi dan saat penulis diamanatkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi (HIMADIE) UNHAS periode 2021 – 2022. Bapak Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM sebagai ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS (sekarang) atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS Prof. Basri Hasanuddin, MA., Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, S.E., MA; Ph.D; Prof. Dr. Rahmatia, MA; Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec; Prof. Dr. Nursini, SE., MA; Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA; Dr. Tadjuddin Parenta, S.E., MA; Dr. Agussalim, S.E., M.Si; Dr. Sultan, SE., M.Si; Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM; Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si., CWM; Dr. Madris, S.E., M.Si., CWM; Dr. Paulus Uppun, MA; Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM; Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CWM; Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MA; Dr. Indraswati T.R., SE., MA., CWM; Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.,

P.hD; Dr. Fatmawati, M.Si., CWM; Dr. Ir. Muhammad Jibril Tojibu, SE., M.Si. Serta kepada seluruh tim penguji dan penilai baik dari eksternal maupun internal yaitu: Bapak Prof. Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si selaku penguji eksternal serta Bapak Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec., Bapak Dr. Madris, DPS, S.E., M.Si., Bapak Dr. Syamsuddin, S.E.,Ak., M.Si., CA. dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si., sebagai penguji internal, yang telah meluangkan waktu untuk menguji, meneliti keabsahan, memberikan kritik, saran yang sangat berguna serta dengan kearifannya juga memberikan kontribusi keilmuan yang sangat berharga dalam setiap tahapan perbaikan proses penyelesaian disertasi ini.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas Selaku Dekan; Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. Hj. Rahmawati Muin., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan; Dr. Amiruddin K, M.El selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dr. Hasbiullah, S.E., M.Si dan Baso Iwang, S.E., P.hD Selaku ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman mahasiswa S3 angkatan 2019 1 program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS serta teman-teman HIMADIE. Kepada teman-teman yang disebutkan di atas penulis kesekian kali mengucapkan terima kasih atas motivasinya serta saling

memberi kabar dan dorongan terhadap kemajuan dan terselesainya studi S3 di PDIE UNHAS ini.

Teristimewa, penulis sampaikan puji syukur dan sembah sujud kepada kedua orang tua, ayahanda H. Lawing (almarhum, 2003/usia 63 tahun) dan ibunda Hj. Mariama (almarhumah, 2011/usia 64 tahun) telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat khususnya ibunda almarhumah (penulis menyebutnya sebagai profesor, walau beliau secara formal tamat Sekolah Dasar), beliau merupakan guru besar penulis, yang setiap saat pesan-pesan dan wejangannya senantiasa penulis ingat dan penulis ucapkan dalam mengisi aktivitas keseharian. Begitu juga kepada mertua ayahanda H. Bandu. (almarhum) dan ibunda Hj. Mellare yang senantiasa memberikan nasehat, dorongan, doa kepada penulis sekeluarga dalam kesempatan ini penulis iringkan dan panjatkan doa kepada beliau. "*Robbighfirlii waliwaalidaiya warkhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo*" (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya/beliau sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil).

Saudara-saudara penulis Kakanda Hj Junnuhati. Hj. Nirwati., H. Abdul Razak, Hj. Jenne, Waris, Hj. Hamdia, Adinda Abdul Rahim, S.Pd., serta Saudara-saudara dari Istri Kakanda Abdul Azis, Darmawati, Kaharuddin, Marhaeni, S.Pd.I., adinda Rosmayanti, SE., dan Aldi Akhir Saputra, S.Pd. penulis betul-betul menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan yang tiada henti serta doanya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNHAS.

Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai istri tersayang Nurbayani, SE., S.Pd., M.Si., CTA., ACPA, serta kedua bidadari kecilku yang tersayang Alifia Fatiyah Nur Resky Rahman (7,5 Tahun) dan Aqila Zakiyah Althafunnisa Rahman (4 Tahun) dengan karakter dan keceriaan, kelucuan khasnya masing-masing mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Yang paling penting dan berharga melalui keluarga inilah (istri dan anak-anak tercinta dan tersayang), penulis terus belajar dan mendapat pelajaran khususnya pemaknaan kekuatan kata syukur, sabar dan ikhlas. Melalui keluarga inilah penulis mendapatkan dasar pijakan pembelajaran dan pentingnya terus dihidupsuburkan peran dan fungsi institusi keluarga, yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *Home Schooling*, sebagai rasa syukur dalam kesempatan ini penulis panjatkan doa: "*Robbi auzi'ni an asykuro ni'matakallatii an'amta 'alaiya wa'alaa waalidaiya wa an 'akmala shoolikhan tardhoohu wa ashlikhlii fii dzurriyyatii ini tubtu ilaika wa innii minalmuslimiina*" (Ya Tuhanku, tunjukilah/ilhamilah daku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholeh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri).

Semua handai taulan, khususnya teman-teman seprofesi yang tergabung di Fakultas Ekomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang senantiasa mendorong dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNHAS dengan ungkapan pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan bila bertemu, "Kapan selesai kuliahnya? Sudah selesai ya

kuliahnya? Kapan syukuran? Dan dengan ucapan “*Alhamdulillah*” penulis dapat mewujudkan terselesainya tugas akhir disertasi ini. Saudara-saudara penulis dan semua handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan nama mereka satu persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun materiel, sehingga penyusunan penulisan disertasi ini dapat terwujud.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi pemerintah pengambil kebijakan khususnya pada kebijakan pembangunan manusia. dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian pembangunan Manusia serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

UPT PUSAT BAHASA

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 INDONESIA
Email :unhaspusatbahasa@gmail.com HP 081344431789

SURAT KETERANGAN ABSTRAK

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama

: Abdul Rahman

No. Pokok

: A013191001

Program Studi

: Ilmu Ekonomi

Judul Tesis/Disertasi

: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah,
dan Upah Minimum terhadap Pengeluaran
kegiatan Pembangunan Manusia di kawasan

Judul Jurnal

: Barat dan Timur Indonesia

Menyatakan bahwa naskah abstrak yang disusun oleh mahasiswa tersebut di atas telah diedit dan diterjemahkan di Pusat Bahasa Unhas.

Makassar, 28 Juni 2022

Mengetahui,
Kepala Pusat Bahasa,



[Signature]
Dra. Herawaty, M.Hum., M.A., Ph.D.
NIP. 19630103 198803 2 003



ABSTRAK

ABDUL RAHMAN. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Timur Indonesia* (dibimbing oleh Nursini, Abd Rahman Razak dan Anas Iswanto Anwar).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja infrastruktur, belanja kesehatan, belanja pendidikan dan upah minimum provinsi, dengan membedakan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data APBD untuk belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, upah minimum provinsi, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing provinsi baik di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Data tersebut berupa data panel yakni 33 provinsi 11 tahun pengamatan. Model analisis yang digunakan adalah model struktural dengan menggunakan Software Rstudio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia, berbeda dengan belanja infrastruktur dan belanja kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan upah minimum positif dan tidak signifikan. Secara tidak langsung, Belanja infrastruktur dan belanja pendidikan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi, demikian pula belanja infrastruktur dan upah minimum melalui penyerapan tenaga kerja. Adapun belanja kesehatan dan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum efektif mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya ditemukan perbedaan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia, di mana KBI memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan KTI khususnya belanja pendidikan dan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan upah minimum pada KTI memiliki pengaruh yang lebih besar melalui penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci. Belanja Infrastruktur, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Upah Minimum, dan Kualitas Pembangunan Manusia



ABSTRACT

ABDUL RAHMAN. *The Effect of Government Expenditure and Minimum Wages on Improving The Quality of Human Development in Western and Eastern Regions of Indonesia* (Supervised by **Nursini, Abdul Rahman Razak,** and **Anas Iswanto Anwar**)

This study aims to determine and analyze the effect of infrastructure spending, health spending, education spending, and provincial minimum wage distinguishing between western and eastern regions of Indonesia on the quality of human development, either directly or through economic growth and employment. The data used was secondary data in the form of APBD data for infrastructure, education and health expenditure, provincial minimum wages, GRDP, and employment for each province, both in the western region of Indonesia (KBI) and in the eastern region of Indonesia (KTI). The data were in the form of panel data, ie 33 provinces for 11 years of observation. The analytical model used was a structural model using the Rstudio software. The research results show that spending on education has a direct positive and significant effect on the quality of human development, unlike spending on infrastructure and health which has a negative and significant effect, while the minimum wage has a positive and non-significant effect. Indirectly, spending on infrastructure and education can improve the quality of human development through economic growth, and spending on infrastructure and minimum wages through employment. Meanwhile, health spending and minimum wages through economic growth and jobs have not effectively promoted the quality of human development. In addition, differences are found between the western and eastern regions of Indonesia, where the KBI has a greater influence than the KTI, especially in education expenditure and minimum wages thanks to the economic growth, while infrastructure spending, education spending, and minimum wages in the KTI have a greater influence through employment.

Keywords: Infrastructure spending, health spending, education spending, minimum wage, and quality of human development



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	22
E. Ruang Lingkup Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Landasan Teoritis dan Konsep	25
1. Paradigma Pembangunan Manusia (<i>Human Development Index/HDI</i>) dan Pengukuran	25
2. Teori Modal Manusia (<i>Human Capital</i>)	36
3. Perdebatan Teori Pengeluaran/Belanja Pemerintah	40
4. Perdebatan Teori Pertumbuhan Ekonomi	48

5.	Hubungan antara Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia	58
6.	Hubungan antara Belanja pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia	64
7.	Hubungan antara Belanja kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia	69
8.	Hubungan antara Upah minimum terhadap Pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia	75
9.	Komparasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)	85
B.	Tinjauan Empiris	87
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS		102
A.	Kerangka Konseptual	102
B.	Hipotesis	117
BAB IV METODE PENELITIAN		123
A.	Rancangan Penelitian	123
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	124
C.	Jenis dan Sumber Data	125
D.	Teknik Analisis Data	126
E.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	143
BAB V HASIL PENELITIAN		147
A.	Gambaran Umum Hasil Penelitian	147
1.	Letak, Batas Geografis dan Administrasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)	147
2.	Kondisi Demografis Indonesia	151
3.	Deskripsi Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia	157

4.	Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia	166
a.	Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Kawasan Barat Indonesia	166
b.	Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja Kawasan Timur Indonesia	172
c.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Penyerapan Tenaga kerja, dan Kualitas Pembangunan Manusia di Indonesia	177
B.	Pengujian Kesesuaian Model	184
C.	Hasil Estimasi Pengaruh Antar Variabel	187
D.	Hasil Pengujian Hipotesis	194
1.	Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Kualitas Pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	194
2.	Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Kualitas Pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	197
3.	Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Kualitas Pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	199
4.	Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kualitas Pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	202
5.	Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> KBI atau KTI terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	204
6.	Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Infrastruktur terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	206

7.	Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Pendidikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	207
8.	Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Kesehatan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	209
9.	Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Upah Minimum Provinsi terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	211
10.	Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyerapan Tenaga Kerja	212
11.	Pengaruh Langsung terhadap Kualitas Pembangunan manusia	214
BAB VI PEMBAHASAN		215
A.	Pembahasan dan Implikasi Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	215
B.	Pembahasan dan Implikasi Belanja Pendidikan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	227
C.	Pembahasan dan Implikasi Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	236
D.	Pembahasan dan Implikasi Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	246
E.	Pembahasan dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> KBI atau KTI Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	255

F.	Pembahasan dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Infrastruktur Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	258
G.	Pembahasan dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Pendidikan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	263
H.	Pembahasan dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Belanja Kesehatan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	268
I.	Pembahasan dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Upah Minimum Provinsi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	271
J.	Pembahasan dan Implikasi Langsung dan Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Penyerapan Tenaga Kerja	274
K.	Pembahasan dan Implikasi Pengaruh Langsung Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia	278
BAB VII PENUTUP		280
7.1	Kesimpulan	280
7.2	Keterbatasan Penelitian	282
7.3	Saran	283
DAFTAR PUSTAKA		288

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan tenaga kerja, belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan belanja kesehatan Pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Tahun 2017 – 2019	5
4.1 Kriteria Pengujian Model	139
4.2 Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Belanja Pemerintah dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia pada KBI dan KTI	140
4.3 Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Indeks	145
5.1 Daerah Administrasi Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2020	149
5.2 Penduduk Menurut Provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2010, 2016 dan 2020	155
5.3 Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, PDRB, Penyerapan Tenaga kerja, HDI dan AHDI Tahun 2010, 2015, dan 2020 di Kawasan Barat Indonesia	167
5.4 Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, PDRB, Penyerapan Tenaga kerja, HDI dan AHDI Tahun 2010, 2015, dan 2020 di Kawasan Timur Indonesia	175
5.5 Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020	177
5.6 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Provinsi Tahun 2011, 2016 dan 2020	178
5.7 Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Upah Minimum Provinsi, PDRB, Penyerapan Tenaga kerja, HDI dan AHDI untuk Rata-Rata 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2020	183
5.8 Hasil Evaluasi Model	184
5.9 Hasil Estimasi Pertumbuhan ekonomi (Y_1), Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) dan Kualitas Pembangunan Manusia (Y_3)	188
5.10 Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung terhadap kualitas pembangunan manusia	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, Tahun 2018 – 2020 (Ribu/Rp)	16
3.1 Kerangka Konseptual	116
5.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1961–2020	152
5.2 Sebaran Penduduk Indonesia	153
5.3 Klasifikasi Penduduk Indonesia	154
5.4 Peta Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, Tahun 2010 – 2020	161
5.5 Peta Rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2010 – 2020	163
5.6 Peta Rata-rata <i>Advanced Human Development Index</i> , Tahun 2010 – 2020 Menurut Provinsi	164
5.7 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Antar Variabel Berdasarkan Model Struktural	191

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Model Persamaan <i>Reduced Form</i>	322
2. Perkembangan AHH, HLS, RTS, Pengeluaran Perkapita, IPM, IKLH Provinsi dan Indonesia Tahun 2010 – 2020	327
3. Hasil Perhitungan AHDI	336
4. Perkembangan Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2020	345
5. Perkembangan PDRB ADHK, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Bekerja, Penyerapan Tenaga Kerja 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2020	361
6. Data Mentah yang Diolah	372
7. Hasil Estimasi Data	386

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/Symbol	Keterangan
AHDI	<i>Advanced Human Development Index</i>
AHH	Angka Harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
ARDL	<i>Autoregressive Distributed Lag Approach</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
CGWBI	<i>Composite Global Well Being Index</i>
DOLS	<i>Dynamic Ordinary Least Square</i>
DPD	Dewan Pengupahan Daerah
DPJK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
ECM	<i>Error Correction Model</i>
GDP	<i>Gross Domestik Product</i>
GMM	<i>Generalized Method of Moments</i>
HCI	<i>Human Capital Index</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
HDIAD	<i>Human Development Index Adjusted for Inequality</i>
HLS	Harapan Lama Sekolah
IHK	Indeks Harga Konsumen

IKH	Indeks Kualitas Hidup
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JAMKESMAS	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KBI	Kawasan Barat Indonesia
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
KHM	Kebutuhan Hidup Minimum
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KTI	Kawasan Timur Indonesia
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
MPI	<i>Multidimensional Poverty Index</i>
OLS	<i>Ordinary Least Square</i>
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	<i>Product Domestik Bruto</i>
PIP	Program Indonesia Pintar
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
RKB	Ruang Kelas Baru
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RSU	Rumah Sakit Umum
PQLI	<i>Physical Quality of Life Index</i>
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SEM	<i>Simultaneous Equation Model</i>
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TLI	Tucker Lewis Index
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	Umur Harapan Hidup
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMP	Upah Minimum Provinsi
UMR	Upah Minimum Regional
UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
USB	Unit Sekolah Baru

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama Bab ini adalah untuk memberikan gambaran dan argumentasi awal tentang mengapa studi ini penting untuk dilakukan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Terkait dengan pembangunan manusia juga merupakan butir kelima agenda pemerintah dalam RPJM 2015 – 2019 (NAWACITA) yang menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Lebih lanjut sebagai poin kedua arah pembangunan Indonesia tahun 2020 – 2024, yakni pembangunan kualitas manusia.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator aktivitas ekonomi suatu perekonomian, tetapi telah keliru disebut sebagai ukuran kesejahteraan manusia yang sangat luas (Costanza *et al.*, 2009; Stiglitz, Sen, and Jean, 2010). Senada dengan Kuznets, (1934); Marcuss and Kane, (2007); McCulla and Smith, (2007)

menjelaskan bahwa GDP tidak pernah dikembangkan untuk mengukur kesejahteraan sosial ekonomi suatu bangsa, masih merupakan parameter yang paling umum dalam mengukur pertumbuhan secara keseluruhan dan kinerja negara mana pun. Tujuan Pembangunan mengalami transformasi, pembangunan tidak identik dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari aspek pendapatan saja, tetapi juga dalam hal menambah kesempatan kerja, peningkatan pendidikan perhatian pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan (Todaro and Smith, 2009, 2015). Sejalan dengan yang ditekankan Romer (1986), Lucas (1988), Barro (1991) dan Barro and Sala-i-Martin (1995) pada aspek kualitas sumber daya manusia.

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 4 besar jumlah penduduk dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 268,07 juta jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 134,66 juta jiwa laki-laki dan 133,42 juta jiwa perempuan Tahun 2019. Berdasarkan komposisi demografi penduduknya, terdapat penduduk usia produktif sebesar 67,65 persen sedangkan penduduk usia non produktif sebesar 32,35 persen. Kondisi demografi semacam ini disebut sebagai bonus demografi (*demographic dividend*), dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif. (Bappenas, BPS, dan United Nation Population Fund, 2013).

Di sisi pendapatan per kapita, menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah (*lower middle income*), jika menengok jauh ke belakang pada tahun 1970-an Indonesia, Korea Selatan dan Malaysia pendapatan per kapitanya hampir sama yakni berada di sekitar USD70. Namun, dua negara tersebut kini sudah melesat jauh meninggalkan Indonesia. Saat ini, Korea Selatan sendiri telah masuk hub negara kaya sejak 1980-an. Dan *income* per kapitanya pada 2019 mencapai USD33.000. Kemudian turun tipis menjadi USD31.500 di

2020. Sedangkan Malaysia dengan berbagai kebijakan dan strateginya berhasil mencapai *income* per kapita pada 2019 sebesar USD12.500. Juga turun tipis pada 2020 yakni di kisaran USD11.500. Masalahnya Indonesia yang sama USD70 dengan Korea Selatan dan Malaysia itu sudah 40 tahun lebih melakukan pembangunan ekonomi secara sistematis masih sepertiganya Malaysia dan sepersepuluhnya Korea Selatan (Putra, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa memang tidak bisa dibandingkan secara imbang dengan kedua negara tersebut. Apalagi Indonesia sendiri menjadi kepulauan dan penduduk terbesar di dunia. Sementara Korea Selatan dan Malaysia dari jumlah penduduk jauh di bawah Indonesia yakni sekitar 30 jutaan.

Jika dilihat dari potensi domestik Indonesia yang sangat kuat dan besar, tidak hanya dari sisi kuantitas penduduk yang besar, namun juga dari segi pertumbuhan ekonomi yang stabil yang dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat selama ini. Dengan melihat potensi dan peluang yang ada, dibutuhkan penguatan ekonomi domestik baik melalui sektor eksternal, investasi, penyerapan APBN, stabilitas moneter, nilai tukar dan keberlanjutan fiskal yang harus tetap dijaga (Anwar, 2020). Namun pada kenyataannya, pembangunan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Fenomena ketimpangan pembangunan antar daerah yang sampai saat ini masih menjadi masalah. Karena pelaksanaan dan hasil pembangunan kurang merata di seluruh wilayah tanah air, dan cenderung terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, masyarakat berpikir bahwa untuk mendapatkan penghasilan yang besar maka harus bekerja di Jawa. Jika hal itu terus berlanjut maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang serius tidak hanya bagi daerah di luar Pulau Jawa, tetapi juga di dalam Pulau Jawa itu sendiri. Penduduk di Pulau Jawa terus meningkat, sedangkan pertumbuhan lapangan kerja kecil,

maka persaingan pemenuhan kebutuhan pokok dan lapangan kerja menjadi semakin sempit.

Secara geografis Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki luas hanya 31,25 persen sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki luas 68,75 persen dari luas wilayah nasional dan memiliki limpahan potensi sumberdaya alam, maka sangat disayangkan apabila KTI menghadapi ketertinggalan pembangunan dan rendahnya tingkat kualitas pembangunan manusia. Periode tahun 2020 – 2024 masih terdapat 62 daerah tertinggal sebagai prioritas yang perlu ditangani. Penetapan daerah tertinggal ini didasarkan atas 6 kriteria yakni: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal aksesibilitas dan karakteristik daerah. Daerah tertinggal tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan proporsi 55 kabupaten (88,71 persen) berada di KTI dan 7 kabupaten (11,29 persen) berada di KBI. Fenomena distribusi daerah tertinggal tersebut bukan hanya di KTI namun juga di KBI.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, dimana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Jika dilihat dari pemerataan pembangunan manusia dilevel wilayah, masih terjadi ketimpangan capaian kualitas pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia. Kualitas pembangunan manusia dengan menggunakan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara KBI dan KTI dimana Kawasan Barat memiliki kualitas pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur. Kawasan Barat yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali memiliki IPM terus mengalami peningkatan antara 73,74 sampai 74,83, berbeda dengan Kawasan Timur yang meliputi Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, meskipun juga setiap tahunnya mengalami peningkatan namun nilainya yang masih jauh lebih rendah.

Tabel 1.1 Perkembangan IPM, Pertumbuhan ekonomi, Penyerapan tenaga kerja, Belanja Infrastruktur, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Tahun 2017 – 2019

Tahun	Uraian	KBI		KTI			
		Sumatera	Jawa dan Bali	Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua
2017	IPM	70.57	73.74	65.16	70.13	68.55	64.37
	PE	4.4	5.55	2.6	5.42	6.75	5.54
	PTK	94.88	94.61	96.70	94.84	95.44	93.95
	INF	23.29	21.14	30.34	31.60	27.55	33.87
	EDU	28.33	31.07	29.34	26.58	25.93	17.88
	HEALTH	12.26	13.42	13.09	13.69	13.66	9.80
2018	IPM	71.18	74.27	65.85	70.79	69.23	65.11
	PE	4.74	5.85	0.34	4.91	6.42	6.87
	PTK	94.94	94.79	96.78	95.21	95.86	94.73
	INF	23.09	18.44	19.99	24.26	21.03	23.17
	EDU	29.36	29.82	29.74	24.94	26.09	18.60
	HEALTH	13.36	13.80	15.33	13.76	14.88	11.52
2019	IPM	71.79	74.83	66.69	71.41	69.93	65.92
	PE	4.58	5.66	4.61	5.38	6.39	-0.34
	PTK	95.03	94.90	96.79	95.40	96.00	94.67
	INF	22.70	17.29	18.17	24.07	19.16	22.39
	EDU	28.68	30.28	30.25	25.14	26.51	18.23
	HEALTH	13.47	14.30	16.48	13.85	15.94	11.90

Sumber: Badan Pusat Statistik, dpjk Tahun 2021 (diolah)

IPM provinsi mengalami perlambatan, dari posisi perbandingan masing-masing provinsi tidak banyak mengalami pergeseran dan kondisi pembangunan manusia masih terjadi ketimpangan atau '*jomplang*'. Hal ini tidak terlepas dari indikator yang berbeda-beda serta program kualitas pengembangan pembangunan manusia tidak sama di masing-masing Provinsi. Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang merepresentasikan kawasan timur memiliki status pembangunan manusia dalam kategori "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sedangkan Sumatera; Jawa dan Bali yang merepresentasikan kawasan barat konsisten

mempertahankan status “Tinggi”. Dengan demikian, keberlanjutan kualitas pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia masih menjadi problem yang membutuhkan penyelesaian karena masih dalam kategori menengah bahkan ada yang masih kategori rendah.

Secara umum wilayah di Indonesia memiliki struktur ekonomi yang berbeda karena faktor *endowment*, hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah disparitas kinerja perekonomian regional yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di mana output provinsi yang lebih kaya dengan faktor *endowment* dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lebih langka faktor *endowment*-nya (Yuniasih, Firdaus and Fahmi, 2013). Pertumbuhan ekonomi di KTI mengalami fluktuasi, tentunya berdampak pada peningkatan IPM. Tahun 2016 – 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, namun IPM justru mengalami peningkatan, meskipun masih lebih rendah di bandingkan rata rata di KBI.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi yang lebih terpenting adalah faktor komponen yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus membaik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpacu pada angka namun dampaknya harus dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Jika dikaitkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di KBI dan KTI, diharapkan mampu berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kesempatan kerja (Siregar and Wahyuni, 2007). Sejalan dengan

Okun dalam teorinya yang berjudul *derive demand theory*, Okun (1962) yang mampu menentukan secara empiris bahwa ada hubungan terbalik antara pengangguran dan total output. Secara empiris di KBI pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan, berbeda dengan di KTI pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dan lebih rendah justru penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan kecuali pulau Maluku dan Papua tahun 2019.

Secara umum IPM, sudah memiliki pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis kondisi setiap orang dalam masyarakat, namun terdapat beberapa masalah baik masalah substansial maupun teknis, sebagaimana telah dijelaskan (Desai, 1991; Morse, 2003, 2014; Herrero, Martínez and Villar, 2010, 2012; Togtokh, Chuluun; and Gaffney, 2010; Dervis and Klugman, 2011; Neumayer, 2012; Kovacevic, 2014). Meskipun IPM telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dengan perubahan teknis perhitungan dan indikator/dimensi (Morse, 2014), salah satunya isu keberlanjutan lingkungan. pengembangan pengukuran kualitas pembangunan manusia yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ramathan, 1999; de la Vega and Urrutia, 2001; Neumayer, 2001; Morse, 2003; Ray, 2014; Hirai, 2017). Dengan demikian, pengukuran pembangunan manusia membutuhkan pendekatan pengukuran yang holistik, terutama pertimbangan faktor lingkungan, terutama pertimbangan faktor lingkungan. Jika pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan HDIGEN, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan. Implikasinya adalah jika pengeluaran pemerintah diarahkan untuk memperbaiki faktor lingkungan, disamping berfokus pada peningkatan pembangunan manusia, maka tujuan pembangunan dapat dicapai secara merata (Olofin, 2020).

Studi sebelumnya telah mengusulkan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan dari kesejahteraan manusia dan oleh karena itu harus dimasukkan dalam ukuran kesejahteraan manusia (Costanza *et al.*, 1997). Untuk itu, pencapaian peningkatan manusia kesejahteraan dianggap sebagai faktor yang menguntungkan dalam memperkirakan berapa banyak pengurangan polusi diinginkan, mengingat biaya pencapaian dalam bidang ekonomi lingkungan (Welsch, 2007). Dengan demikian, Disertasi ini menggunakan model *Advanced Human Development Index* (AHDI) yang dikembangkan (Karnitis, Bicevskis and Karnitis, 2021). AHDI ini sejalan dengan Program PBB, Agenda 2030 yang memiliki visi menciptakan pembangunan maju dengan memperkenalkan paradigma pembangunan manusia, seimbang paradigma pembangunan terintegrasi yang tiga dimensi: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jika dicermati kondisi tersebut, maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui investasi atau belanja yang tercermin dari kebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan Teori Keynes menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat dan akhirnya memberikan ransangan terhadap arus perputaran ekonomi di daerah yang melibatkan sektor publik dan sektor privat. Salah satu perangkat yang bisa digunakan oleh pemerintah adalah pengalokasian anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (Sanada, 2009). Perekonomian modern memiliki 3 peran utama, yaitu 1) peranan alokasi atau efisiensi, pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan efisien, 2) peranan distribusi, pemerintah mendistribusikan sumberdaya dan manfaat pembangunan agar tercipta keadilan dalam masyarakat, dan 3) peranan stabilitas, pemerintah menciptakan kestabilan dalam

perekonomian sehingga ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Dalam mengimplementasikan ketiga peran tersebut pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Ritonga, 2014). Belanja pemerintah terklarifikasi dalam bentuk belanja menurut fungsi yaitu meliputi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran). Dari kesembilan fungsi tersebut, tanpa mendiskreditkan fungsi yang lain, terdapat empat fungsi yang perlu dikaji mendalam untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kualitas pembangunan manusia diantaranya yaitu fungsi perumahan dan fasilitas umum, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan manusia dibutuhkan beberapa kebijakan publik (Ranis, *et.al*, 2000). Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dijelaskan (Lucas, 1988; Romer, 1990, 1994) telah mengedepankan pentingnya kebijakan sektor sosial, yang sebagian besar berfokus pada peningkatan pembangunan manusia. Hal yang sama dijelaskan dengan model *endogenous* Barro and Sala-i-Martin (2004), yang menjelaskan pentingnya kebijakan fiskal pendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi di topang oleh peningkatan belanja pemerintah untuk layanan publik serta pengembangan teknologi untuk mencapai kualitas manusia yang lebih tinggi.

Belanja sektor publik merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan manusia. Belanja ini sangat penting untuk membiayai infrastruktur, termasuk jalan, telekomunikasi, listrik, dan air. Di samping itu, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk ekonomi saat ini dan lebih efisien dan efektif dibandingkan yang mampu disediakan pasar. Alokasi belanja khususnya belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan yang menguntungkan atau merangsang investor berinvestasi dan disisi lain dapat pula diwujudkan iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi.

Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi, 2006). Infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan yang sangat diperlukan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Vytautas and Simkunaite, 2009; Suleiman, Najat Nassor & Albiman, 2014; Carvalho, Nepal and Jamasb, 2015; Faridi, Chaudhry and Ramzan, 2015). Studi empiris juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah (lihat misalnya Holtz-Eakin and Schwartz, 1995; Démurger, 2001; Servén and Calderón M., 2004; Fedderke, Perkins and Luiz, 2006; Estache and Fay, 2009; Maryaningsih, Hermansyah and Savitri, 2014; Slesman, Baharumshah and Ra'ees, 2015; Abu Bakar and Che Mat, 2017; Ebu *et al.*, 2019; Luu *et al.*, 2019; Ouattara and Zhang, 2019; Väilä, 2020).

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menggerakkan pembangunan terutama perekonomian. Kualitas maupun kuantitas infrastruktur dapat memberikan banyak manfaat terhadap keberlangsungan masyarakat. Infrastruktur berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses pada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi yaitu, keberlanjutan fiskal, perkembangan pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja (Nainggola, 2013). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur merangsang pembangunan manusia (Kusharjanto and Kim, 2011; Sapkota, 2014; Mohanty, Nayak and Chatterjee, 2016).

Proporsi alokasi belanja infrastruktur (fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum serta fungsi ekonomi), antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan dan memiliki proporsi yang berbeda. Mengindikasikan bahwa Kalimantan yang memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan pulau lain yaitu sekitar 24,07 persen dan dari lima provinsi yang ada hanya Kalimantan Barat memiliki IPM yang status rendah sedangkan yang lainnya status tinggi. Walaupun demikian, alokasi belanja yang besar tidak menjamin nilai IPM yang tinggi. Sebagaimana yang terjadi di Papua dan Maluku tahun 2018 dengan proporsi alokasi yang besar tidak berdampak pada peningkatan IPM, dimana Papua dan Maluku memiliki proporsi alokasi belanja sebesar 23,17 persen dengan IPM sebesar 65,11, yang merupakan paling rendah dari empat pulau yang ada. Sebaliknya yang terjadi di Jawa dan Bali memiliki proporsi yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain namun memiliki IPM yang tinggi.

Belanja infrastruktur pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kualitas pembangunan manusia. Selain itu, infrastruktur yang dapat memadai meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang mengakibatkan peningkatan pendapatan, yang akan menuju pada perbaikan kualitas pembangunan manusia.

Selain belanja infrastruktur, hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia yang telah lama diakui oleh ekonom (Schultz, 1961; Becker, 1962; Uzawa, 1965; Rosen, 1976; Becker, Murphy and Tamura, 1990; Todaro and Smith, 2009; 2015). Schultz menegaskan bahwa investasi pada manusia seperti pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan merupakan penyebab utama peningkatan pendapatan riil per pekerja. Sejalan dengan Becker (1960), investasi dalam modal manusia meningkatkan produktivitas individu dan penghasilan. Ide dasarnya bahwa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan lebih sehat diharapkan relatif lebih produktif. Dalam jangka panjang, guna peningkatan modal pembangunan manusia dibutuhkan penyaluran belanja modal pada sektor pendidikan dan kesehatan (Stephen and Oluranti, 2011). Senada dengan (Anand and Ravallion, 1993; Edeme, 2014; Das, Mandal and Patra, 2019; Ferraz *et al.*, 2020) pengeluaran pemerintah pada sektor sosial mempengaruhi keberhasilan pembangunan manusia.

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas faktor produksi. Kualitas

faktor produksi sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semuanya hanya dapat dicapai dengan adanya kesehatan dan pendidikan yang baik.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan hanya sekedar hak azasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat. Kesehatan dan pendidikan membutuhkan campur tangan dari pemerintah karena merupakan penyediaan barang publik (Todaro and Smith, 2009). Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan publik.

Secara empiris menunjukkan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia berbeda, pada tahun 2019 menunjukkan wilayah Sumatera, Jawa dan Bali merupakan wilayah memiliki proporsi terbesar masing-masing 28,68 persen dan 30,28 persen berdampak pada kualitas pembangunan manusia yang tinggi pula, namun hal ini tidak diikuti di wilayah Nusa Tenggara memiliki alokasi belanja yang besar tetapi IPM yang rendah sebaliknya pada Kalimantan memiliki alokasi belanja terkecil kedua setelah Maluku dan Papua namun memiliki IPM tetap tinggi. Kondisi ini juga terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi pola pergerakan data belanja pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan kualitas

pembangunan manusia. Secara teoritis berbeda dikemukakan Becker (1962), pengeluaran yang digunakan untuk peningkatan kualitas penduduk akan memberikan hasil yang lebih baik. Artinya, pengeluaran pemerintah dapat dijadikan sebagai instrumen dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana studi terdahulu baik belanja pendidikan dan kesehatan terbukti memberikan penguatan yang dibangun oleh Becker (Baldacci *et al.*, 2008; Razmi, and Mohammadi, 2012; Edeme, 2014; Iheoma, 2014; Das, Mandal and Patra, 2019).

Dengan demikian, dibutuhkan efisiensi pengeluaran publik pada sektor sosial (baik untuk pendidikan dan kesehatan) serta tata kelola yang baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan berdampak membantu dalam meningkatkan besarnya pembangunan manusia (Mohanty and Bhanumurthy, 2020). Senada dengan Ranis.,*et.al*, (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh campur tangan pemerintah berperan penting dalam pembangunan manusia. Mohanty and Bhanumurthy (2020), menjelaskan variasi antar negara termasuk akselerasi berbasis luas dan lapangan kerja menciptakan ekonomi pertumbuhan; tingkat alokasi sumber daya untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; pengiriman efektif dari layanan publik; ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik; dan promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam mencapai MDGs.

Kebijakan lainnya yang biasa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kegagalan pasar sehingga bisa lebih efisien dan merata, sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan, dalam hal ini pemerintah membuat sebuah kebijakan terkait penetapan upah minimum yang merupakan ukuran penting dari kebijakan sosial

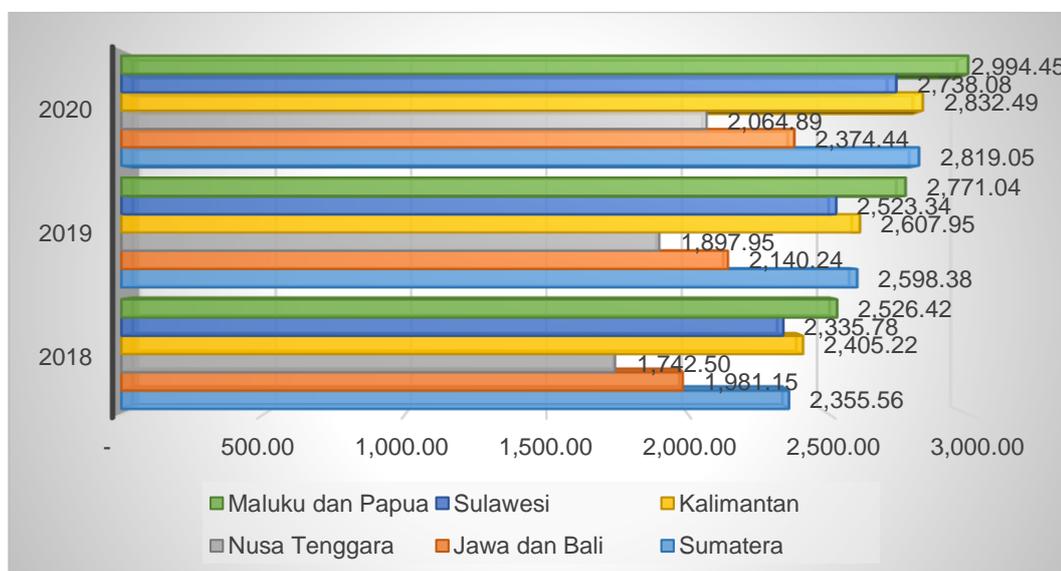
dan ekonomi negara (Macerinskaite, Kedaitis, and Balezentis, 2016). Sejalan dengan Bentham (1948) dalam Pressman (2002), pemerintah memiliki tanggung jawab dan menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai kebijakan baik di bidang ekonomi dan sosial.

Hal ini diharapkan dapat terhindar dari tekanan kompetitif serta pengusaha tidak memaksa tenaga kerja, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan industri, untuk mengurangi pemogokan dan meningkatkan daya beli konsumen (Sunarsih *et al.*, 2019). Dengan demikian, dapat meningkatkan jumlah barang yang diproduksi, dikonsumsi dan meningkatkan kesempatan kerja (Douglas, 1934). Sejalan dengan teori neoklasik yakni teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi pekerja. Jumlah usaha yang dilakukan pekerja dalam pekerjaannya berhubungan terhadap kemampuan perusahaan membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. perusahaan akan bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya. Dengan upah yang tinggi memungkinkan akan menguntungkan karena dapat menaikkan efisiensi para pekerja. Selain itu, dengan upah yang tinggi memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya (Pressman, 2002). Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi nutrisi yang baik untuk anaknya, sehingga akan memberi dampak yang besar dalam peningkatan produktivitasnya yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan teori ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang diminta berbanding terbalik dengan upah, sedangkan perusahaan yang menghendaki keuntungan maksimum dapat memilih jumlah tenaga kerja yang menjadikan nilai pertambahan marginal tenaga kerja dikalikan

dengan harga jual barang yang diproduksi per unit sama dengan upah. Lebih lanjut perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja (Bellante. D. and Jackson. M, 1990).

Gambar 1.1 Perkembangan Upah Minimum di Indonesia, Tahun 2018 – 2020 (Ribu/Rp)



Sumber: BPS data diolah, Tahun 2021

Upah minimum provinsi yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan dengan besaran yang berbeda, hal ini menggambarkan bahwa Maluku dan Papua mempunyai upah minimum yang terbesar dibanding dengan wilayah lain di tahun 2019 2,994.45. Walaupun demikian, upah yang tinggi tidak berdampak kualitas pembangunan manusia yang tinggi wilayah tersebut (Tabel 1.1). Sebaliknya yang terjadi di Jawa dan Bali memiliki upah minimum yang terendah namun kualitas pembangunan manusia berada kategori tinggi. Demikian pula secara regional, tahun 2019 – 2020 Provinsi Papua, Papua Barat dan Sulawesi utara menetapkan upah minimum yang tertinggi di antara provinsi lainnya, di mana Papua posisi kedua setelah DKI Jakarta, disusul Sulawesi utara posisi ketiga dan Papua barat posisi kelima dari 34 Provinsi. Hal yang sama tahun 2017 – 2018 ada empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki upah

minimum tertinggi yakni Papua barat, Nusa tenggara barat, Nusa tenggara timur, dan Maluku. Namun Papua dan Papua barat memiliki pembangunan manusia yang paling rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya serta pertumbuhan ekonomi yang terendah, berbeda dengan Sulawesi Utara dengan upah minimum yang tinggi dibarengi dengan peningkatan pembangunan manusia dari posisi ketujuh tahun 2019 naik menjadi posisi keenam tahun 2020.

Kebijakan upah minimum masih menjadi perdebatan ada yang setuju dan ada yang kurang setuju terkait kebijakan ini (Wu and Liu, 1999; Rutkowski, 2003; Neumark and Wascher, 2007; Haughton and Khandker, 2009). Pihak yang setuju dengan kebijakan ini berargumen, kebijakan pemerintah terkait penetapan besaran upah minimum merupakan satu cara untuk meningkatkan pendapatan para pekerja demi terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak (KHL). Seiring dengan bertambahnya pendapatan pekerja, maka tingkat konsumsi pekerja juga meningkat. Tingkat konsumsi yang meningkat mendorong munculnya jenis-jenis usaha baru yang berpotensi menambah lapangan pekerjaan baru (Luttmer, 2007; Autor, Katz and Kearney, 2008; Aaronson, Agarwal and French, 2012; Autor, Manning and Smith, 2016).

Di sisi lain pihak yang kurang setuju dengan kebijakan ini berpendapat, dengan adanya penetapan UMR di atas titik keseimbangan pasar, mendorong bermunculannya kaum muda yang ingin mencari pekerjaan, namun tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan untuk memperkerjakan mereka. Hal ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap secara maksimal, dengan kata lain menimbulkan bertambahnya pengangguran (Brown, 1982, 1999; Neumark, David; Wascher, 2008; Lemos, 2008; Rubinstein, 2015; Zipperer, 2016; Powell, 2017; Clemens and Wither, 2019; Wye and Bahri, 2020).

Terkait pertumbuhan ekonomi, campur tangan pemerintah juga berperan penting (Patricia, C.N and Izuchukwu, 2013; Lago-Peñas, Cantarero-Prieto and Blázquez-Fernández, 2013; Mercan and Sezer, 2014; Awaworyi Churchill, Yew and Ugur, 2015; Kurt, 2015; Mallick, 2016; Sethi *et al.*, 2020) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran publik (pendidikan dan kesehatan) memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai terbukti berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia (Ranis,et.al., 2000; Khodabakhshi, 2011; Suri, 2011; Gabriel, 2013; Atmakuri, Reddy and Rao, 2014; Pinheiro, Niederauer and Vargas, 2014; Mohanty and Bhanumurthy, 2020).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, baik secara teoritis maupun empiris menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana untuk menentukan arah kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Bidani and Ravallion, 1997; Ranis and Stewart, 2000; Gupta, S., 2002; Gupta, Verhoeven and Tiongson, 2003; Ehrlich, 2007; Baldacci *et al.*, 2008; Iheoma, 2012, 2014) terutama belanja pemerintah (khususnya bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengalokasikan belanja publik akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, begitupula upah minimum dapat berdampak pada taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi sangat penting karena manusia sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan suatu negara. Jika dapat diketahui pengaruh belanja pemerintah (khususnya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, maka perbaikan tingkat kualitas sumber daya manusia akan dapat ditingkatkan.

Demikian pula, kebijakan pemerintah terkait alokasi belanja publik dan penetapan upah minimum menjadi sangat penting mengingat perbedaan regional

yang luas baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pembangunan manusia. Di samping itu, belanja pemerintah diharapkan sebagai komponen penting dari kebijakan ekonomi, dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mempromosikan berkelanjutan pembangunan manusia. Dengan demikian, topik yang spesifik yang dirumuskan dalam judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Timur Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah belanja infrastruktur berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
2. Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
3. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
4. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
5. Apakah ada perbedaan kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?

6. Apakah ada perbedaan pengaruh belanja infrastruktur terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
7. Apakah ada perbedaan pengaruh belanja pendidikan terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
8. Apakah ada perbedaan pengaruh belanja kesehatan terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
9. Apakah ada perbedaan pengaruh upah minimum terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?
10. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui penyerapan tenaga kerja?
11. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh belanja infrastruktur terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Pengaruh belanja pendidikan terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Pengaruh belanja kesehatan terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Pengaruh upah minimum terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5. Perbedaan kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6. Perbedaan pengaruh belanja infrastruktur terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
7. Perbedaan pengaruh belanja pendidikan terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
8. Perbedaan pengaruh belanja kesehatan terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
9. Perbedaan pengaruh upah minimum terhadap kualitas pembangunan manusia antara KBI dan KTI baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
10. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun melalui penyerapan tenaga kerja.

11. Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kualitas pembangunan manusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari studi ini, nantinya diharapkan memberikan beberapa manfaat, khususnya yang terkait pengembangan keilmuan (teoritis) dan studi empirik serta pengembangan kebijakan pembangunan khususnya keberlanjutan pembangunan manusia, sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komperensif tentang fundamental ekonomi publik (*public finance*), khususnya terkait pembangunan manusia antara KBI dan KTI yang saling terkait dengan alokasi belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum provinsi;
2. Diharapkan sebagai pengembangan keilmuan/teori, dimana secara induktif memberikan hasil studi empirik yang menunjukkan korelasi antar variabel-variabel yang diteliti;
3. Diharapkan sebagai dasar penetapan dan implementasi kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia dalam penyediaan alokasi belanja, khususnya belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan belanja kesehatan serta upah minimum provinsi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
4. Diharapkan sebagai dasar berpikir bagi pengembangan kegiatan studi selanjutnya, baik dengan lokasi dan waktu yang berbeda maupun dengan pengembangan dan penyempurnaan variabel-variabel studi terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah negara Indonesia yang meliputi 33 provinsi, yakni 17 Provinsi di Kawasan Indonesia Barat dan 16 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, diantaranya: Nanggore Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Sedangkan termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Karena provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2013, dan karena keterbatasan data sehingga dalam penelitian ini ditentukan hanya 16 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang dijadikan objek penelitian.

Sementara terkait kebijakan ekonomi meliputi pengeluaran pemerintah baik belanja infrastruktur (belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum serta fungsi ekonomi), belanja fungsi pendidikan dan belanja kesehatan, sedangkan upah minimum provinsi untuk kebijakan pendapatan dan sosial (kebijakan non moneter). Keempatnya sebagai variabel eksogen yang berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening terhadap kualitas pembangunan manusia sebagai variabel endogen. Data yang digunakan adalah data panel (gabungan data *time series* dan *cross section*) yakni dari tahun 2010 – 2020 dan 33 Provinsi dengan menggunakan model struktural.

F. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari Tujuh (7) Bab. Bab satu memuat latar belakang sebagai gambaran dan argumen pentingnya studi ini dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab dua berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan teoritis dan konsep serta tinjauan empiris yang berhubungan dengan kajian penulisan ini yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bab tiga menggambarkan kerangka konseptual dan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan pokok kajian disertasi ini, kemudian Bab empat memuat Metode penelitian meliputi rancangan penelitian, rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

Bab lima menyajikan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum hasil penelitian, pengujian kesesuaian model, hasil estimasi dan pengaruh antar variabel (digambarkan pengaruh belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan upah minimum terhadap kualitas pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta perbandingan pengaruhnya di Kawasan Barat dan Timur Indonesia).

Bab enam menggambarkan pembahasan hasil penelitian serta implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Bab terakhir adalah Bab tujuh berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang disampaikan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan Bab ini diarahkan untuk mengulas kembali isu teoretis dan empiris pada berbagai referensi atau studi empiris terkait sebelumnya. Untuk itu, Bab ini mendeskripsikan tentang tinjauan teoritis dan konsep serta studi empiris sebelumnya atau yang punya relevansi dengan rumusan masalah dan metode analisis penelitian yang digunakan.

A. Tinjauan Teoritis dan Konsep

1. Paradigma Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) dan Pengukuran

Sebelum tahun 1990-an, Bank Dunia menelusuri pendapatan sebagai faktor yang paling berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Namun, Pendekatan Kapabilitas Sen (1993, 2000) mempengaruhi Bank Dunia untuk mengubah arahnya dari ketergantungannya hanya pada indikator-indikator ekonomi menjadi lebih peduli dengan cara kehidupan yang sebenarnya dipimpin oleh manusia, dan pengaruhnya terlihat dalam laporan *United Nations Development Programme* (UNDP). Pembangunan manusia, menurut Sen, tidak dapat dibatasi pada pertumbuhan produk nasional bruto, kenaikan pendapatan, atau peningkatan tingkat industrialisasi dan kemajuan teknologi. Dia melanjutkan bahwa pendapatan, utilitas, sumber daya, dan kekayaan bertindak sebagai sarana menuju tujuan pembangunan manusia, dan bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Jadi, pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan individu terjadi dengan peningkatan kerangka kelembagaan seperti pasar, layanan publik, sistem peradilan, partai politik, dan lain-lain. Selain itu, pembangunan manusia benar-benar berarti membuat orang lebih mampu melalui investasi sektor sosial dan infrastruktur publik dan dalam jangka panjang tujuan ini akan tercapai meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kemampuan sosial masyarakat (Alexander, 2004, 2007).

Sebagian besar ilmuwan sosial dan ekonom akan setuju bahwa GNP per kapita adalah ukuran kualitas hidup yang kasar dan tidak lengkap (Nussbaum & Sen, 1993; Szirmai, 2015). Berawal dari konsep yang diperkenalkan Morris (1979) "*Physical Quality of Life Index (PQLI)*" atau Indeks Kualitas Hidup (IKH) yaitu gabungan tiga faktor: 1) Tingkat Harapan Hidup; 2) Angka Kematian; 3) Tingkat Melek Huruf. Kemudian HDI dikembangkan oleh Amartya Sen, seorang pemenang penghargaan Nobel India dan Mahbub ul Haq, seorang ekonom Pakistan dengan dukungan dari Gustav Ranis dari Yale University dan *Lord Meghnad Desai* dari *London School of Economics*, selanjutnya *United Nations Development Program* menerimanya di *Human Development Report Office* sebagai dasar untuk mengukur kinerja ekonomi negara (UNDP, 2018). Dengan demikian, hal inilah banyak digunakan oleh negara dan atau daerah, dengan berpijak pada konsep yang dibangun oleh (Sen, 1993, 2000; Haq, 1996).

Laporan pembangunan manusia pertama yang diterbitkan oleh UNDP pada tahun 1990 menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi orang-orang untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah laporan yang diterbitkan oleh UNDP dan digunakan untuk membandingkan status

pembangunan ekonomi riil suatu negara. IPM adalah instrumen geometris Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengambil fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi memungkinkan lebih banyak perhatian pada harapan hidup, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Menurut Klasen (2018) UNDP memberikan beberapa inovasi kunci, *Pertama*, ia menawarkan narasi baru pembangunan berdasarkan paradigma pembangunan manusia, dengan demikian menantang fokus tunggal pada efisiensi ekonomi dan pendapatan per kapita. Berbeda dengan tantangan *ad hoc* sebelumnya terhadap keunggulan pendapatan per kapita, seperti pendekatan kebutuhan dasar tahun 1970-an (Jolly, 1976; Streeten, et.al, 1981), keuntungan dari paradigma pembangunan manusia adalah hubungannya dengan pendekatan kapabilitas Sen sebagai sebuah konsepsi alternatif tentang apa itu pembangunan (Sen, 1998). Dalam pendekatan itu, sumber daya ekonomi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yang ditangkap lebih baik dengan menggambarkan ciri-ciri kehidupan yang sebenarnya dapat dijalani orang (disebut fungsi) atau kebebasan untuk mencapai fungsi tersebut (disebut kemampuan). Hal ini memberikan landasan paradigma pembangunan manusia yang lebih tahan lama dan meyakinkan. *Kedua*, dan terkait erat dengan poin pertama, IPM baru, sementara itu sendiri merupakan ukuran ringkasan yang agak kasar, memberikan indikator untuk melacak kemajuan dalam pembangunan manusia.

Ketiga, Laporan Pembangunan Manusia menjadi rangkaian baru laporan unggulan yang terus mengembangkan paradigma pembangunan manusia, menghubungkan dengan isu-isu ketimpangan, gender, hak, perubahan iklim, keamanan manusia dan mobilitas manusia, di antara topik-topik lainnya. Narasi alternatif tentang topik-topik ini, yang didasarkan pada paradigma pembangunan

manusia, dikembangkan dan dimasukkan ke dalam perdebatan pembangunan internasional. Inovasi terakhir sekarang disebut '*dasbor*' pengembangan, sebuah kompilasi dari berbagai indikator yang berkaitan dengan perkembangan manusia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembangunan manusia adalah proses memperbesar kebebasan bagi semua manusia dan bergantung pada kemampuan individu dan kebebasan untuk mencapai fungsi (Sen, 1979, 1980, 1982, 1988; Anand, Sidhir. Sen, 1994; Anand and Sen, 2000; Robeyns, 2003, 2005, 2006; UNDP, 2016; Mark Mitchell, 2016). Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa pendapatan per kapita adalah penting tetapi bukan ukuran yang memadai untuk pembangunan manusia, tetapi meningkatkan kualitas hidup seperti yang terwujud dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, akses yang lebih mudah ke pekerjaan dan kehidupan yang lebih sehat, keamanan pangan dan akses ke air portabel, perumahan yang terjangkau, lingkungan yang berkelanjutan dan harapan hidup yang lebih besar. Untuk memperkirakan fenomena ini secara sederhana, IPM diukur sebagai rata-rata geometris pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan (UNDP, 2016).

Menurut Sagar and Najam (1998), IPM mengarah pada perspektif yang terdistorsi sehingga tidak mampu menyajikan pandangan yang komprehensif tentang dimensi pembangunan manusia. Untuk itu, IPM mencerminkan rata-rata, mengabaikan kelompok penduduk yang belum memperoleh manfaat dari pencapaian IPM (Bilbao-Ubillos, 2013a). Ada beberapa masalah kritik dan debat lainnya, seperti kebutuhan tindakan pendidikan gabungan dan kualitatif, logaritma pendapatan dan proses normalisasi yang memadai, serta kebutuhan untuk mempertimbangkan dimensi tambahan pembangunan manusia seperti ketidaksetaraan gender dan pendapatan, keselamatan dan pembunuhan, demokrasi, variabel lingkungan, kondisi

hidup pengungsi, dan diskriminasi (Nussbaum, 2000; Grimm *et al.*, 2008; Seth, 2013; Fukuda-Parr, Lawson-Remer and Randolph, 2009; Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2009; Seth, 2009; Herrero, Martínez and Villar, 2010; Domínguez-Serrano and Blancas, 2011; Bilbao-Ubillos, 2013b, 2013a; Decancq, 2016; Seth, Suman and Santos, 2018).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa studi telah mengembangkan indeks baru. Namun, IPM mendapat banyak kritik. Smith (1993) memelopori untuk menghasilkan dan mendukung modifikasi signifikan pada indeks pembangunan manusia. Noorbakhsh (1998) telah menyoroti berbagai kritik terhadap IPM dan juga telah mengembangkan empat indeks IPM yang dimodifikasi. Jahan (2002) telah mengidentifikasi beberapa ketidaksempurnaan dalam IPM dan juga telah membuat daftar beberapa indeks alternatif seperti HPI (Indeks Kemiskinan Manusia), GDI (Indeks Pembangunan Terkait Gender) dan Ukuran Pemberdayaan Gender (GEM). Mazumdar (2003) telah mengembangkan metode alternatif untuk menghitung IPM menggunakan Produk Domestik Bruto Riil Per Kapita (PCRGDP) yang tidak disesuaikan. Pada tahun 2010, sebuah indeks baru bernama *Inequality Adjusted HDI* diterbitkan dengan mempertimbangkan Koefisien Gini dan relevansi ketidaksetaraan karena upaya Paul (1996), Hicks (1997) bersama dengan Hirschowitz and Orkin (1997). Ogowang (2000) dan Fukuda-Parr (2003) telah memberikan saran untuk penambahan dimensi gender pada IPM. Harttgen and Klasen (2010) telah menganjurkan penggunaan IPM berbasis rumah tangga. Lebih lanjut, Doessel ve Gounder (1994) mengemukakan pentingnya nilai absolut atas peringkat dalam estimasi IPM. (Panigrahi and Sivramkrishna, 2002; Osberg and Sharpe, 2003; Cherchye, Ooghe and Van Puyenbroeck, 2008) telah menyatakan keprihatinan

mereka terhadap pemeringkatan IPM. Harkness (2004) telah menyoroti pengumpulan data yang dapat diandalkan sebagai hambatan utama di negara-negara berpenghasilan rendah.

Ranis, Stewart and Samman (2006) memperluas IPM menjadi sebelas dimensi pembangunan manusia, dan Fukuda-Parr, Lawson-Remer and Randolph (2009) mengusulkan indikator baru dengan enam hak dasar (kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan yang layak). Domínguez-Serrano and Blancas (2011) dan Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2009) memperkenalkan pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan manusia. Grimm *et al.*, (2008) mengembangkan metode baru yang menggabungkan efek distribusi pendapatan pada pembangunan manusia (berdasarkan misalnya pada kritik dari Hicks 1997). Ravallion (2012) merumuskan kembali IPM dengan fungsi kumulatif untuk pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, dan Herrero, Martínez and Villar (2010) menunjukkan bahwa pengukuran IPM dapat ditingkatkan.

Human Development Index Adjusted for Inequality (HDIAD), atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) (Alkire and Foster, 2010; UNDP, 2016). Indikator ini membantu pembuat kebijakan dan keputusan untuk membandingkan tingkat absolut dari pembangunan dan deprivasi manusia di wilayah dan negara mereka serta mengidentifikasi potensi hambatan. Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI), yang melihat di luar pendapatan untuk memahami bagaimana orang mengalami kemiskinan dalam berbagai cara dan simultan (Alkire and Foster, 2010; UNDP, 2016). Namun, MPI juga tidak menilai tanggung jawab formal dan efisiensi sosial. Singkatnya, semua indikator ini hanya berfokus pada tingkat absolut perkembangan dan deprivasi manusia. Namun, indikator tersebut tidak

mempertimbangkan efisiensi sosial daerah dalam menerjemahkan sumber daya keuangan ke dalam pembangunan manusia. Mihci, Taner and Sezen, (2012) telah mengembangkan alternatif IPM dengan mempertimbangkan pengangguran. Jha *et al.*, (2017) mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia yang Disesuaikan dengan Kesehatan. Comim (2016) mencoba memperbesar perspektif pembangunan manusia dengan menggunakan pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Dia juga menyelidiki ukuran alternatif pembangunan manusia, termasuk subyektif, berbasis tujuan, keberlanjutan dan indikator lain dari pembangunan manusia.

Chaaban, Irani and Khoury (2016) mengembangkan *Composite Global Well-Being Index* (CGWBI), mencakup sepuluh dimensi kesejahteraan: keselamatan dan keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dan ruang hidup, pekerjaan, pendapatan, kepuasan hidup, komunitas dan kehidupan sosial, dan keterlibatan sipil. Indeks ini menggunakan data survei subjektif dan indikator sosial-ekonomi, sehingga CGWBI yang dirancang sangat berkorelasi dengan IPM yang banyak digunakan; namun, CGWBI kurang sensitif terhadap efek pendapatan dibandingkan dengan IPM. Oleh karena itu, CGWBI memberikan peningkatan atas IPM, dengan mencakup dimensi kesejahteraan utama tambahan dan meminimalkan dampak pendapatan per kapita pada peringkat pembangunan manusia secara keseluruhan.

Dewasa ini, menjadi perhatian utama adalah pembangunan berkelanjutan yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan atau dokumen baru yang diresmikan di tahun 2015 sebagai tindak lanjut berakhirnya program *Millennium Development Goals* (MDGs). Isi dokumen ini terdiri dari 17 poin tujuan yang lebih rinci

dibandingkan ICPD dan MDGs. Permasalahan lingkungan merupakan poin yang banyak ditambahkan di dokumen ini. Dokumen ini mencoba memadukan konsep *Economic Development Goals, Population Development Goals, dan Environmental Developmnen Goals* yang pada akhirnya akan tercipta keberlanjutan. Maksud dari pembangunan keberlanjutan adalah dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memikirkan kebutuhan hari esok. Serta di lakukan penyesuaian struktural yang telah memberikan jalan bagi agenda yang lebih luas dan lebih berfokus pada pembangunan manusia. Pembangunan manusia telah dikanonisasi di semua buku teks standar tentang ekonomi pembangunan atau studi pembangunan (Misalnya Ray, 1997; Perkins, 2013; Todaro and Smith, 2015).

Untuk membentuk pembangunan manusia sebagai tren berkelanjutan global, yang akan menjamin kesejahteraan peluang untuk generasi mendatang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi yang maju tentang konsep pembangunan, Agenda 2030, yang mencakup dimensi lingkungan selain dimensi ekonomi dan sosial. Konsep tersebut memperkirakan energi sebagai salah satunya pilar utama untuk kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan lebih lanjut di abad ke-21: "Pengembangan sistem energi yang berkelanjutan membutuhkan pertimbangan dari ketiga keberlanjutan dimensi: lingkungan, ekonomi dan sosial (Ness *et al.*, 2007; Jeswani *et al.*, 2010; Santoyo-Castelazo and Azapagic, 2014).

Masalah seperti jangka panjang efisiensi energi dan keamanan energi menjadi sangat penting di luar konteks energi: "Jelas bahwa sektor energi harus menjadi jantung upaya untuk memimpin dunia jalur yang lebih berkelanjutan (Biol, 2018). Bahkan, di era modern sekarang kajian terkait kesadaran terhadap isu ketahanan energi mengalami peningkatan (Strielkowski and Čábelková, 2015;

Strielkowski, Štreimikienė and Bilan, 2017). Sejalan dengan Nematollahi *et al.*, (2016), banyak terdapat ketakutan dan kekhawatiran seperti menipisnya bahan bakar fosil dan minyak, ketergantungan Pada sumber energi asing, ketegasan negara-negara penyuplai energi, tuntutan energi berkembang dan negara dunia ketiga, dan meningkatnya permintaan dari negara maju, masalah lingkungan dan efisiensi ekonomi (Ignatavičius, Tvaronavičiene and Piccinetti, 2015; Tvaronavičiene and Cerneviciute, 2015; Tvaronavičienė *et al.*, 2015; Tvaronavičienė, 2016; Dobrovolskienė, Tvaronavičienė and Tamošiūnienė, 2017).

Peranan konsumsi energi untuk pembangunan manusia yang yang berkelanjutan paling baik ditunjukkan dengan pengukuran pertumbuhan tingkat pembangunan secara keseluruhan, hal ini dianggap sebagai hal penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan investasi jangka panjang.

Secara umum IPM, sudah memiliki pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis kondisi setiap orang dalam masyarakat, namun terdapat beberapa masalah baik masalah substansial maupun teknis, sebagaimana telah dijelaskan (Desai, 1991; Morse, 2003, 2014; Herrero, Martínez and Villar, 2010, 2012; Togtokh, Chuluun; and Gaffney, 2010; Dervis and Klugman, 2011; Neumayer, 2012; Kovacevic, 2014). Meskipun IPM telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dengan perubahan teknis perhitungan dan indikator/dimensi (Morse, 2014), salah satunya isu keberlanjutan lingkungan.

Beberapa penelitian telah mencoba mengintegrasikan dimensi lingkungan dalam IPM (Ramathan, 1999; de la Vega and Urrutia, 2001; Neumayer, 2001; Morse, 2003; Ray, 2014; Hirai, 2017). Secara khusus, Manusia Indeks Pembangunan Berkelanjutan (HSDI) yang diperkenalkan oleh Togtokh and Gaffney (2010),

ditingkatkan Türe, (2013) mengembangkan pendekatan yang berbeda dan membagi IPM dengan “jejak ekologis”, yang tidak hanya menyumbang emisi karbon tetapi juga biokapasitas lahan pertanian, penggembalaan, hutan dan perikanan. Bravo (2014) yang menambahkan indeks per emisi CO₂ kapita dalam rata-rata geometrik di samping tiga yang asli indikator IPM, Biggeri and Mauro (2018), telah mengembangkan alternatif indeks yang memasukkan tidak hanya indikator ekologi (emisi CO₂) tetapi juga indikator sosial tambahan, kebebasan (didefinisikan sebagai hak politik dan kebebasan sipil). Türe and Türe (2021) mengembangkan perhitungan IPM dengan menggunakan modal alam (jasa ekosistem) dengan menambahkan sub-komponen baru pemerintahan, inklusi sosial, status ekonomi, pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, kinerja lingkungan kota dan transportasi.

Dengan demikian, untuk mewujudkan visi agenda 2030, dibutuhkan metodologi pengukuran yang konsisten tentang bagaimana paradigma pembangunan manusia yang berkelanjutan yakni Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Lanjut (AHDI) yaitu menggabungkan dimensi sosial dan ekonomi dengan dimensi lingkungan (Karnitis, Bicevskis and Karnitis, 2021). AHDI telah dirancang, yang memastikan kesatuan dan kesesuaian dari semua indeks dimensi komprehensif yang disertakan. Perhitungan mengkonfirmasi keakuratan dan kesederhanaan pengukuran. Metodologi dan AHDI yang diusulkan, sebagai indeks sederhana dan seimbang yang didasarkan pada indeks berita utama yang berorientasi pada hasil, berikan gambaran besar, yang transparan, dapat diterima dan dapat digunakan oleh para ahli, politisi dan komunitas global untuk menilai tingkat pembangunan yang dicapai dan untuk membuat keputusan strategis untuk periode mendatang.

Lebih lanjut Karnitis, Bicevskis and Karnitis (2021) menjelaskan metodologi dan perhitungan AHDI memperhatikan prinsip-prinsip Agenda 2030 dan pengalaman yang diperoleh dalam mengukur pembangunan manusia, mengajukan beberapa asumsi (*postulat*) memasukkan indikator dimensi lingkungan dalam kerangka kerja dalam hal metodologi dan pengukuran pembangunan manusia. *Pertama* Keturunan, evolusi daripada revolusi; dalam menciptakan IPM sebagai pengganti PDB, PDB yang sangat populer tidak dibuang. Itu termasuk dalam set dimensi HDI indeks, dilengkapi dengan indeks umur panjang dan pengetahuan. tidak ada alasan atau tidak perlu berhenti menggunakan prinsip ini di masa depan. Penggunaan HDI, yaitu diterima secara global di tingkat ahli dan politik, adalah bijaksana dalam penciptaan AHDI untuk menggambarkan dimensi sosial dan ekonomi. Secara signifikan, semua proposal pengukuran tidak langsung yang dijelaskan dirancang persis dengan melengkapi IPM dengan beberapa: indikator lingkungan.

Kedua Kesederhanaan indikator dan penggunaan beberapa indeks dimensi memberikan pemahaman non-ekonomi, politisi dan masyarakat, yang penting untuk pengambilan keputusan politik. Keuntungan utama dari PDB, yang memungkinkannya untuk memperoleh penerimaan politik yang kuat dan menjadi "tokoh statistik paling kuat dalam manusia" sejarah", adalah kesederhanaan penggunaannya. Demikian juga, "kesederhanaan IPM, ditambah dengan transparansi terjamin dengan pemanfaatan data yang diterbitkan oleh internasional organisasi, telah menjadi salah satu pendorong utama di balik keberhasilan IPM di dua puluh tahun terakhir". Aspek kesederhanaan dalam menciptakan AHDI tidak boleh diremehkan; desain AHDI, hanya menggunakan beberapa indikator, akan berkontribusi untuk popularitasnya.

Hanya satu indikator headline yang komprehensif yang harus dipilih untuk mencirikan dimensi lingkungan.

Ketiga Fitur penting dari desain HDI adalah kesatuan dan kesesuaian dari ketiga dimensi indeks; ini dikonfirmasi oleh korelasi positif yang kuat antara indeks. Pada gilirannya, metodologi HDI menjamin efek dimensi yang seimbang indeks nilai IPM. Bobot yang sama dari indikator dimensi yang bersatu dan konsisten di AHDI adalah keputusan terbaik setelah Agenda 2030 diterima secara politik pengaturan pembangunan secara “seimbang dan terintegrasi”. *Kempat* Indikator dimensi apa pun harus memberikan cakupan aspek yang sepenuhnya mungkin dari dimensi Agenda 2030 yang bersangkutan. Indikator lingkungan yang dipilih harus juga mencakup berbagai aspek pencemaran, degradasi dan pelestarian lingkungan; mengingat keragaman aspek lingkungan, indeks dimensi terintegrasi akan memiliki untuk digunakan dalam praktek. Serta *terakhir* Tidak ada alasan rasional untuk mengembangkan indeks lingkungan baru yang komprehensif; sebagai gantinya, diinginkan untuk menggunakan indeks stabil yang sudah ada yang dielaborasi oleh level tinggi ahli dan itu sudah diterima secara politik.

2. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja dianggap sebagai faktor eksogen yang bergantung pada rasio antara tenaga kerja dan modal fisik, ditambah faktor lain (kemajuan teknis), tetapi efek menguntungkan pendidikan pada potensi pertumbuhan produktivitas tidak diperhitungkan. Teori pertumbuhan ekonomi baru yang dikembangkan di awal tahun 1980-an muncul untuk mengoreksi kekurangan teori klasik yang menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi (elemen modal manusia) dalam pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. (Mincer, 1958; Schultz, 1961; Arrow, 1962; Becker, 1962; Aghion, and Howitt, 1992), menjelaskan bahwa modal manusia sama seperti modal fisik dan seseorang dapat berinvestasi di dalamnya melalui pendidikan, kesehatan dan pelatihan yang pada gilirannya akan meningkatkan output dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, modal manusia dapat dianggap sebagai salah satu faktor terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi (Lucas, 1988; Mankiw Romer and Weil, 1992; De La Fuente, 2000; Barro, 2001; De la Fuente, 2006). Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara (Jhingan, 2016). Pembentukan modal manusia berkaitan erat dengan investasi pada manusia.

Menurut Schultz, terdapat lima cara pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut: 1) Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; 2) Latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan 3) Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi; 4) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; 5) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Teori *human capital* mengalami perkembangan yang memiliki tiga konsep. *Konsep pertama* adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri

manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. *Konsep kedua* menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Kai Ming Au, A., Altman, Y. and Roussel, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1990) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen, 1999). Frank & Bernanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Namun, ada perdebatan mengenai saluran yang digunakan modal manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, modal manusia diartikan sebagai faktor produksi yang *independen*, yang meningkatkan produktivitas untuk tingkat teknologi tertentu (Lucas, 1988; Mankiw, Romer and Weil, 1992). Di sisi lain, modal manusia dilihat sebagai masukan dalam proses inovasi dan oleh karena itu sebagai pelengkap teknologi (Nelson and Phelps, 1966; Romer, 1990; Benhabib and Spiegel, 1994). Oleh karena itu, tingkat modal manusia yang lebih tinggi mengarah pada generasi atau difusi teknologi baru atau adopsi yang lebih efisien dari teknologi tertentu, sehingga menggeser batas kemungkinan produksi yang ditetapkan ke luar.

Blundell *et al.*, (1999) mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan output bergantung pada akumulasi modal manusia dan inovasi. Stok modal manusia melalui tingkat pendidikan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Temuan ini didukung oleh Cinnirella and Streb (2017) yang mempelajari dampak *human capital* terhadap pertumbuhan yang melibatkan berbagai saluran. Studi ini menemukan bahwa peningkatan modal manusia secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam produksi. Kemudian, sumber daya manusia melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan masukan penting untuk penelitian & pengembangan (R&D) yang mempercepat perubahan teknologi.

Modal manusia merupakan investasi produktif mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi yang dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan, dan perawatan kesehatan (Todaro and Smith, 2009). Upaya pembangunan manusia kaitannya dengan istilah investasi SDM. Becker (1994) lebih lanjut menjelaskan bahwa manusia bukan hanya sumber daya tetapi juga investasi yang menghasilkan pengembalian dan pengeluarannya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas manusia. Nilai tambah dalam diri manusia tercipta saat pendidikan dan keterampilan berguna. Modal manusia diukur dengan pendidikan dan pelatihan. Pada akhirnya, kesehatan dan pendidikan ini akan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Menurut Jhingan (2016), investasi pada modal manusia dalam pengertian luas adalah pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial pada umumnya.

Menurut Todaro and Smith (2009), kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Peningkatan modal kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan, sebagian karena kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehadiran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dan dalam proses pembelajaran. Usia lebih panjang akan meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan; kesehatan yang lebih baik dalam masa kerja seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat penyusutan modal pendidikan. Kemudian, peningkatan modal pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena sebagian besar program di bidang kesehatan bergantung pada keterampilan yang dipelajari selama berada di sekolah, misalnya kesehatan dan kebersihan pribadi, serta pembentukan dan pelatihan bagi petugas kesehatan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi produktif dari investasi di bidang pendidikan akan meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan yang berkontribusi dalam meningkatkan angka harapan hidup.

3. Perdebatan Teori Pengeluaran/Belanja Pemerintah

Setiap sistem perekonomian, apakah itu sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, pemerintah senantiasa memiliki peranan yang sangat penting, di dalam perekonomian sosialis peranan pemerintah sangat besar namun sebaliknya pada sistem perekonomian kapitalis terbatas. Menurut Adam Smith mengemukakan bahwa ada tiga fungsi pemerintah, diantaranya: 1) fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; 2) fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan dan 3) fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta (Mangkoesoebroto, 2001).

Namun dalam perekonomian modern pemerintah memiliki 3 peranan utama yaitu 1) peranan alokasi atau efisiensi, pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan efisien, 2) peranan distribusi, pemerintah mendistribusikan sumberdaya dan manfaat pembangunan agar tercipta keadilan dalam masyarakat, dan 3) peranan stabilitas, pemerintah menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat (Musgrave and Musgrave, 1989; Marlow, 1995; Mangkoesoebroto, 2001). Di samping itu, pemerintah bisa berfungsi sebagai pembuat peningkatan efisiensi di dalam perekonomian dan sebagainya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*core function*) (Gwartney, Holcombe and Lawson, 1998).

Barton (2000), menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat; 2) peran regulator, mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi; 3) peran kesejahteraan sosial, mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (*transfer payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat dan 4) peran mengelola ekonomi makro, pemerintah memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

Secara teoritis, Ram (1986) mengungkapkan bahwa dalam hal penentuan besarnya peranan sektor pemerintah dan sektor swasta terdapat dua kelompok teori yang memberikan tanggapan yang kontradiktif. Secara teoritis menurut salah satu pendapat ekstrim menyatakan bahwa peranan pemerintah yang lebih besar dapat mengganggu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena (1) Operasi pemerintah sering dikelola secara tidak efisien; (2) Proses pengaturan (regulasi) menimbulkan beban dan biaya terhadap; dan (3) Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter cenderung menimbulkan penyimpangan dengan mengganggu insentif ekonomi dan menurunkan produktivitas ekonomi.

Sebaliknya, suatu pandangan ekstrim lainnya dikemukakan oleh (Landau, 1985) bahwa sektor pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan, dengan menganggap bahwa peranan pemerintah yang besar akan menjadi mesin pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Pemikiran demikian dilandasi oleh beberapa hal, yakni, (1) Peranan pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara kepentingan swasta dan kepentingan sosial; (2) Mencegah eksploitasi pihak luar negeri terhadap negara; dan (3) Menjaga serta meningkatkan produktivitas investasi dan menetapkan target pertumbuhan dan pembangunan optimal yang dapat diterima masyarakat.

Era perekonomian modern saat ini, terjadi reformasi terkait peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas pembangunan manusia. Peran perekonomian dalam perekonomian diawali pandangan Keynes yang menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makro. Terkait teori Keynes

mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Kebijakan fiskal yang ekspansif dinilai dapat mendorong investasi melalui peningkatan *agregat demand* (permintaan Agregat). Keynes berpendapat peningkatan permintaan agregat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan selanjutnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Keynes hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif dari pemerintah akan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan, ekonomi Klasik tidak setuju adanya campur tangan pemerintah yang efektif dalam untuk mengatur perekonomian (Sukirno, 2013). Terutama ekspansi kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter yang bertujuan mempengaruhi perbelanjaan agregat sebagai alat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Akan tetapi pandangan ini tidaklah berarti ahli-ahli ekonomi Klasik menolak sama sekali kegiatan pemerintah di bidang ekonomi. Mereka melihat pemerintah mempunyai beberapa peranan penting dalam menciptakan sistem pasar bebas yang efisien. Misalnya mewujudkan infrastruktur untuk operasi perusahaan swasta, menyediakan peraturan dan fasilitas yang membantu mempertinggi efisiensi operasi perusahaan swasta serta menyediakan jasa-jasa penting kepada khalayak ramai

tetapi tidak dapat disediakan oleh swasta secara permanen efisien/murah seperti kesehatan dan pendidikan.

Belanja pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013; Rosen, 2014; Wahyuddin, 2020).

Pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2001), model pengeluaran pemerintah adalah: 1) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase inventasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi; 2) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar; dan 3) Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Pengaruh antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, diawali oleh Adolph Wagner seorang ekonom politik dari Jerman (1835-1917) yang dikenal dengan Hukum Wagner atau disebut sebagai *law of increasing (extension) state activities* (Chang, 2002; Shams and Murad, 2009; Bojanic, 2013). Menurut hukum

tersebut, bagian (*share*) dari sektor publik dalam ekonomi akan meningkat seperti proses pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah peneliti memberikan penafsiran atas teori ini melalui uji empiris, dengan menyatakan bahwa ada empat hipotesa dari verifikasi empiris hukum wagner (*four hypotheses for the empirical verification of Wagner's law*), yaitu 1) belanja pemerintah (*public expenditures*) harus meningkat pada suatu angka tetap yang lebih cepat dari output; 2) pertumbuhan ekonomi-ekonomi saham dari belanja konsumsi publik (*public consumption expenditures*) dalam *income* nasional meningkat; 3) sebagai pengalaman pertumbuhan ekonomi bangsa, suatu peningkatan harus terjadi melalui aktivitas-aktivitas sektor publik dan rasio peningkatan, ketika dikonversikan ke dalam syarat-syarat belanja akan melampaui angka peningkatan output per kapita; dan 4) harus ada peningkatan angka dari sektor publik atau rasio belanja publik pada GNP dalam konteks pembangunan suatu negara dari pendapatan per kapita rendah menuju pendapatan per kapita yang tinggi (yaitu elastisitas belanja publik sebagai suatu saham dari per kapita GNP yang lebih besar dari kesatuan) (Presmchand, 1994). Wagner menjelaskan bahwa "*as the process of economic development took place government expenditure must increase at a faster rate than output*" (Toye, 1981).

Belanja pemerintah sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung akan menaikkan total output (Brons *et al.*, 1999). Lin (1994), secara garis besar mengatakan ada sesuatu yang penting sejalan dengan peran di mana pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan. Loizides and Vamvoukas (2005) mengatakan bahwa belanja pemerintah dapat mempercepat pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi. Jadi belanja pemerintah dianggap sebagai suatu kekuatan eksogenus yang dapat merubah *output agregat*.

Belanja pemerintah selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga digunakan untuk membiayai sektor publik sangat penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Ranis, et.al., (2000); Ehrlich, (2007); Iheoma, (2012), (2014), dibutuhkan beberapa kebijakan publik. Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dijelaskan Lucas (1988) dan Romer (1990) telah mengedepankan pentingnya kebijakan sektor sosial, yang sebagian besar berfokus pada peningkatan pembangunan manusia.

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi infrastruktur untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian dari (Alexiou, 2009; Dereje, 2012; Haque, 2012; Ndambiri *et al.*, 2012; Agbonkhese, Abraham Oni; Asekome, 2014; Mushtaq *et al.*, 2014; Ayinde, Kuranga and Lukman, 2015; Sabir, 2015; Gupta, 2018) bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda hasil penelitian (Schaltegger and Torgler, 2006; Nasiru, 2012; Gifari, 2016; Iheanacho, 2016; Jeff-Anyeneh and Ibenta, 2019) bahwa belanja memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, (Folster and Henrekson, 2001) pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara maju dan (Olaoye & Oladipo, 2019), pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hal sama hasil penelitian Okombi (2018) di Kongo bahwa dalam jangka pendek

pengeluaran publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama dikonfirmasi oleh Dar and AmirKhalkhali (2002) dari Negara-negara OECD.

Pengaruh negatif pengeluaran publik terhadap pertumbuhan juga dikuatkan oleh Obad and Jamal (2016) untuk kasus Maroko. Namun, jauh sebelum Obad dan Jamal (2016), Nubukpo (2007) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, dampak pengeluaran publik global terhadap pertumbuhan ekonomi dan Moneter Uni Barat Afrika (UEMOA) sangat dibedakan menurut negara: efek negatif di Benin dan Niger, efek positif di Senegal dan Togo, dan efek non-signifikan di Burkina Faso, di Pantai Gading dan di Mali. Bahkan, penelitian Barro (1991), dan Engen and Skinner (1992), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Secara konsep teoretis telah dibuktikan oleh Ram (1986) dan Barro (1990), Ram (1986) menyatakan bahwa besarnya pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi adalah linier positif atau negatif tergantung pada pengaruh belanja pemerintah terhadap output swasta dan produktivitas relatif antara sektor pemerintah dan swasta. Sementara itu, Barro (1990) menyatakan bahwa pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif sampai dengan titik tertentu. Kemudian, jika *government size* telah melewati titik tersebut, maka pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif.

Hal ini juga dijelaskan Armey (1995), menjelaskan hubungan antara *government size* dengan pertumbuhan ekonomi melalui fenomena Kurva Armey, kurva ini menggunakan teknik grafis Arthur Laffer (1980). Kurva Armey berbentuk U-terbalik, dimana sumbu vertikal adalah pertumbuhan ekonomi dan sumbu horizontal

adalah *government size*. Pada awalnya *government size* memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan, namun ketika *government size* semakin besar maka akan terjadi efek negatif. Hal ini terjadi akibat pengeluaran pemerintah yang berlebihan berkonsekuensi pada kenaikan utang dan pajak yang tinggi, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi yang menurun.

Solikin (2018), tinjauan atas empat puluh artikel yang mencakup tujuh puluh dua negara menunjukkan bahwa temuan penelitian beragam, baik yang mendukung Hukum Wagner, Hipotesis Keynes, keduanya, atau tidak mendukung keduanya. Perbedaan hasil tersebut disebabkan karena perbedaan data, metode uji, serta variabel lain yang ditambahkan dalam model. Implikasinya, peran anggaran pemerintah dalam kebijakan publik perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan memfokuskan pada jenis pengeluaran tertentu.

4. Perdebatan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (Boediono, 1999; Nafziger, 2006; Jhingan, 2016) sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sebagai sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 3 komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduknya; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan

ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Berdasarkan perspektif sejarah pengalaman yang dialami oleh negara-negara terutama di Eropa, teori pertumbuhan *linear stage of growth theory* yang dikembangkan Rostow, dengan memformulasi pola pembangunan melalui tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi. Adapun tahapan dimaksud 1) Tahap perekonomian modern; 2) Tahap prakondisi tinggal landas; 3) Tahap tinggal landas; 4) tahap menuju kedewasaan dan 5) Tahap menuju konsumsi tinggi (Kuncoro, 2006; Jhingan, 2016). Untuk menuju tahap ketiga tahap tinggal landas syarat utama yang dibutuhkan kenaikan laju investasi produktif sekitar 5 – 10 persen dari pendapatan nasional, karena hanya dengan terciptanya keadaan tersebut perekonomian dapat berkembang lebih laju daripada tingkat pertumbuhan penduduk (Sadono, 2007)

Todaro and Smith (2009) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: *Pertama* Akumulasi modal. Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan dimasa depan. Pabrik, mesin peralatan dan bahan baru meningkatkan persediaan modal fisik suatu negara (total nilai riil netto semua barang fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat output yang akan dicapai. Investasi langsung yang produktif ini dilakukan dengan berinvestasi apa yang dikenal dengan infrastruktur ekonomi dan sosial, jalan raya, listrik, air bersih dan sanitasi, komunikasi dan sejenisnya yang memfasilitasi dan mengintegrasikan berbagai kegiatan perekonomian.

Kedua, Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dipandang sebagai faktor positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti pekerja produktif yang lebih banyak, dan dengan jumlah penduduk yang besar secara menyeluruh akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri. *Terakhir* kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, banyak ekonom memandang bahwa komponen ini paling penting. Kemajuan teknologi dalam bentuknya paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena perbaikan atas cara lama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan secara tradisional. Kemajuan teknologi ini terdapat tiga klasifikasi yakni netral, hemat tenaga kerja dan hemat modal. Kemajuan teknologi yang netral terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Di negara-negara dunia ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi, hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien.

Pertumbuhan ekonomi secara sistematis diawali Adam Smith (1776) dalam (Jhingan, 2016). Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary state*). Hal ini diikuti ekonom

klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus dan Mill (Jhingan, 2016) meramalkan kondisi stasioner pada akhir pemupukan modal.

Pandangan Smith (1776) dan para pengikut ekonom klasik lainnya dikoreksi oleh Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijaksanaan fiskal (pajak dan belanja pemerintah), kebijaksanaan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. Namun teori Keynes tidak menganalisa masalah ekonomi negara berkembang (Jhingan, 2016).

Teori klasik dan teori Keynes tetap mengandalkan mekanisme pasar, namun Keynes lebih menitikkan beratkan peran pemerintah yang cukup besar sebaliknya teori klasik peran pemerintah yang diminimalkan. Walaupun berbeda, kedua teori tersebut tugas pemerintah adalah mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih mantap dan berkelanjutan (Arsyad, 2010). Dari perbedaan ini memunculkan pertanyaan bagaimana pengaruh dan signifikansi peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harold Domar mengembangkan teori Keynes tentang model pertumbuhan ekonomi terkait kegiatan ekonomi dan penggunaan tenaga kerja untuk menciptakan pertumbuhan mantap dalam jangka panjang (*steady growth*), yang tergantung dari pembentukan modal. Menurut klasik pemupukan modal sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menambah produksi, sedangkan Keynes pemupukan modal digunakan untuk meningkatkan pengeluaran masyarakat. Namun teori Harold Domar, menggabungkan kedua fungsi pemupukan modal tersebut dalam mendorong kegiatan ekonomi, dipandang sebagai pengeluaran yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian untuk memproduksi dan

pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Hal inilah menjadi kelemahan teori Keynes, yakni apabila suatu waktu dilaksanakan sejumlah pembentukan modal, maka berikutnya perekonomian tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memproduksi barang dan peningkatan kemampuan produksi tidak secara otomatis akan meningkatkan produksi dan pendapatan.

Harold Domar sejalan dengan Keynes, kenaikan produksi dan pendapatan tidak ditentukan kenaikan dalam kemampuan produksi masyarakat, namun tergantung pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, jika kemampuan produksi meningkat, maka pendapatan nasional akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari analisa ini, Harold Domar, menjelaskan diperlukan pembentukan modal yang meningkat sebagai syarat pertumbuhan ekonomi mantap dalam jangka panjang. Hal ini didasarkan pada asumsi 1) perekonomian bersifat tertutup; 2) hasrat menabung ($MPS = s$) konstan; 3) proses produksi mempunyai koefisien yang tetap dan 4) tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar keempat asumsi tersebut, Harold domar membuat analisis dan menjelaskan syarat pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh penambahan produksi dapat terserap dipasar), hanya bisa tercapai apabila *Growth*/tingkat pertumbuhan output (g) sama dengan *Capital*/tingkat pertumbuhan modal (c) sama dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n).

Untuk menjaga keseimbangan, maka antara tabungan (S) dan (I) harus terdapat hubungan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk

memproduksi tambahan output ditentukan oleh v (*capital output ratio* = rasio modal output). Apabila tabungan dan investasi adalah sama ($I = S$).

Pertumbuhan ekonomi yang mantap, harus dipenuhi syarat $g = n = s/v$. Karena s , v dan n bersifat tetap dalam perekonomian tertutup, maka sulit untuk mencapai pertumbuhan yang mantap. Untuk perekonomian daerah yang mengalami kekakuan di atas, (Richardson, 2001) menjelaskan bahwa perekonomian daerah harus bersifat terbuka. Di samping itu, teori Harold Domar berdasarkan mekanisme pasar tanpa melibatkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Namun di sisi lain, dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam menentukan alokasi investasi untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran output (Tarigan, 2005).

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik juga dikenal sebagai determinan faktor pertumbuhan ekonomi dikemukakan Todaro dan Smith (2009) yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dibangun untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003, 2007; Arsyad, 2010).

Model Solow sama halnya dengan model model Harold Domar, jumlah output perekonomian sebuah daerah tergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja yang dibentuk dalam sebuah fungsi produksi, yang mempunyai hasil yang konstan. Kerangka tersebut mirip dengan model Harold Domar, namun model Solow luwes, karena menghindari unsur “ketidakstabilan” sebagai ciri tingkat pertumbuhan yang dijamin model Harold Domar dan bisa luwes dalam menjelaskan distribusi pendapatan. Dari asumsi *return to scale* (hasil skala konstan), sehingga kedua sisi

persamaan dibagi dengan tenaga kerja (L), jumlah output dapat diidentifikasi per tenaga kerja merupakan fungsi dari modal per tenaga kerja yakni $Y/L = f(K/L, 1)$ dan selanjutnya dapat ditulis kembali persamaan $y = f(k)$, yang melukiskan output per tenaga kerja merupakan fungsi dari modal per tenaga kerja. Ketersediaan modal ini menjadi faktor penentu output perekonomian yang dibutuhkan, karena dapat berubah setiap saat dan perubahan itu bias mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua faktor utama yang mempengaruhi modal adalah investasi dan depresiasi.

Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal (k) dan output $f(k)$ adalah tetap, hal ini biasa dinotasikan dengan symbol k^* . Akumulasi modal ini tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output atau produksi, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan atau stabil di mana akumulasi modal dan output adalah konstan (Mankiw, 2003, 2007).

Faktor laju pertumbuhan penduduk dan teknologi merupakan faktor lain yang menentukan perekonomian. Pertumbuhan penduduk dan penyusutan dapat mengurangi akumulasi modal per tenaga kerja, artinya dengan jumlah penduduk, mempengaruhi jumlah modal per tenaga kerja dan berdampak pada output yang dihasilkan per tenaga kerja, sehingga dalam kondisi mapan di dalam perekonomian dibutuhkan investasi yang dapat mengoffset pengaruh penyusutan dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*), yaitu $\Delta k = i - (\delta + n) k$. Dengan demikian, maka investasi ini akan dapat; 1) menciptakan pendapatan, melalui kenaikan output 2) memperbesar kapasitas produksi dengan

meningkatkan stok modal. Investasi sebagai sumberdaya/akumulasi modal yang dipersiapkan dan digunakan pada saat sekarang melalui berbagai proses dalam perekonomian dengan harapan akan mendapatkan sejumlah hasil di masa yang akan datang dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi (Eduardhus, 2001).

Satu catatan penting adalah bahwa meski dalam kondisi *steady state* akumulasi modal dan output per tenaga kerja adalah tetap, tetapi dalam kenyataan perekonomian sebenarnya output total dan total akumulasi modal tetap meningkat dari masa ke masa, sedangkan untuk teknologi adalah variabel eksogen yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi sepanjang waktu. Kemajuan teknologi ini dikonotasikan dalam efisiensi tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan masyarakat akan metode produksi baru; ketika penggunaan teknologi mengalami peningkatan, maka akan terjadi efisiensi tenaga kerja dapat meningkat (Mankiw, 2003, 2007).

Pertumbuhan ekonomi menuju kondisi mapan dapat terjadi pada saat teknologi dan investasi suatu perekonomian sudah tinggi dan pertumbuhan penduduk serta penyusutan yang terjadi rendah. Namun selama ini, investasi pada daerah atau negara berkembang lebih besar dari penyusutan, daerah atau negara tersebut akan mengalami pertumbuhan berlanjut sehingga ketimpangan pendapatan daerah diprediksikan semakin mengecil dengan adanya kegiatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang miskin (Barro and Sala-i-Martin, 1995).

Selanjutnya teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) dikembangkan untuk menyempurnakan model pertumbuhan Neo Klasik, menekankan peranan kemajuan teknologi sebagai hal yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Barro and Sala-i-Martin (2004), menjelaskan

bahwa dengan kemajuan teknologi yang diikuti dengan spesialisasi tenaga kerja dan temuan barang dan jasa baru, serta dapat memperbaiki teknik produksi. Romer (1996) lebih lanjut menjelaskan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi pengetahuan. Lebih lanjut Loening (2005) mengemukakan bahwa teori pertumbuhan baru, memberikan penekanan faktor endogen dari kemajuan teknologi yang dapat dibuat dalam model, sehingga dapat memberikan implikasi bahwa dalam jangka panjang, otoritas atau kebijakan pemerintah dapat sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan endogen juga, menjelaskan bahwa investasi modal fisik dan modal manusia memiliki peran dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peran pemerintah dalam perekonomian sebuah daerah dapat dilihat melalui pengaruhnya dalam mendorong konsumsi, investasi publik dan penerimaan dari pajak. Teori ini juga ketersediaan infrastruktur, hukum dan peraturan perundang-undangan, stabilitas politik regulasi pemerintah, birokrasi dan nilai tukar sebagai faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Namun, yang menjadi kelemahan model pertumbuhan endogen adalah model ini hanya menekankan pada pertumbuhan jangka panjang sehingga pertumbuhan jangka pendek dan menengah terabaikan. Maka dari itu model pertumbuhan endogen agak kurang cocok dengan negara-negara berkembang, di mana hambatan pertumbuhan lebih pada persoalan struktur (Mankiw, 1995, 2000). Selanjutnya dikembangkan Barro and Sala-i-martin (1992) memasukkan unsur pemerintah sebagai agregat belanja pemerintah.

Teori pertumbuhan yang dibangun dalam hubungannya dengan belanja publik terlihat dalam karyanya yang berjudul *Public Finance in Models of Economic Growth*

(1992). Teori ini berangkat dari teori utilitas rumah tangga yang memegang aset riil dalam bentuk modal fisik dan modal manusia yang akan habis menurut waktu. Model yang kemudian dibangun berangkat dari model pertumbuhan *endogenous* (Ak model), di mana produsen akan meminjam pada tingkat suku bunga dengan dasar memaksimalkan penerimaan nilai bersih sekarang (*net present value revenue*). Individu termasuk produsen kemudian menerima barang publik (*non exclusive*) yang nilai sebesar belanja pemerintah (*government expenditure*) yang terbagi pada seluruh produsen. Model ini tetap menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas.

Barro and Sala-i-Martin (1995), mengemukakan bahwa modal terdiri atas semua input yang berbentuk fisik, seperti mesin, bangunan, jalan dan komputer. Barang-barang ini digunakan untuk produksi dan tidak untuk dikonsumsi serta digunakan untuk kegiatan produksi berikutnya. Barang-barang ini diinvestasikan oleh pihak swasta dan juga oleh pemerintah dalam bentuk bentuk infrastruktur jalan, listrik, pengairan, sarana prasarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lainnya. Modal yang berasal dari pemerintah, yang dikenal dengan barang publik tidak dimasukkan dalam persamaan cobb-Douglas dari model neoklasik. Mankiw, Romer and Weil (1992) kemudian memasukkan modal manusia (*human capital*) sebagai modal non fisik. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pengaruh belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

5. Hubungan Antara Belanja Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia

Pembahasan terkait peran infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari gagasan Rosenstein-Rodan (1943) dan Hirschman (1957) yang menegaskan pentingnya investasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, baru pada tahun 1970-an (Arrow, KJ; and Kurz, 1970) dan pada 1980-an dan 1990-an (Romer, 1986, 1990; Lucas, 1988; Barro, 1990) modal publik secara teoritis dimodelkan dalam fungsi produksi agregat. Penyediaan fasilitas infrastruktur akan dapat nantinya memperlancar arus perputaran perekonomian termasuk didalamnya bagaimana menjamin kelangsungan hidup manusia.

Sistem ini merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Grigg and Fontane, 2000). Sistem infrastruktur dapat dijelaskan sebagai fasilitas dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial ekonomi masyarakat. Pada dasarnya infrastruktur merupakan satu sistem yang saling mendukung terhadap lainnya baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Senada dengan Kodoatie (2005), bahwa infrastruktur adalah aset yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Argumen ini memperkuat penjelasan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dalam artian dapat mempercepat akses yang dibutuhkan masing-masing pelaku ekonomi dan sosial lainnya.

Infrastruktur mencakup banyak aspek termasuk jalan, kereta api, pelabuhan dan sistem telekomunikasi, serta perkembangan institusional seperti kedalaman layanan akuntansi dan hukum (Ross, 2015). Sejak abad ke 19, hubungan antara pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus

beberapa penelitian. Secara umum, menyarankan bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Studi empiris tentang dampak infrastruktur dimulai dengan tulisan Aschauer (1989), yang menyimpulkan bahwa produktivitas marjinal belanja infrastruktur publik dua hingga empat kali lebih tinggi daripada produktivitas modal swasta. Elastisitas output yang besar dari infrastruktur juga ditemukan Munnell (1990) dan Ford and Poret (1991). Selanjutnya dikembangkan beberapa peneliti (Holtz-Eakin and Schwartz, 1995; Démurger, 2001; Servén and Calderón M., 2004; Fedderke, Perkins and Luiz, 2006; Estache and Fay, 2009; Maryaningsih, Hermansyah and Savitri, 2014; Slesman, Baharumshah and Ra'ees, 2015; Abu Bakar and Che Mat, 2017; Ebu *et al.*, 2019; Luu *et al.*, 2019; Ouattara and Zhang, 2019; Väilä, 2020).

Barlas (2020) mengevaluasi pengaruh komposisi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Afghanistan periode 2004 hingga 2019, menemukan belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Afganistan. Hal sama dengan Lahirushan and Gunasekara (2015) menyelidiki hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia menggunakan data sekunder dari tahun 1970 hingga 2013. Hasilnya menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara variabel sasaran. Selain itu, mereka menegaskan hubungan jangka panjang untuk pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di negara-negara Asia.

Fedderke and Bogetic (2009), juga menjelaskan bahwa dalam literatur pembangunan terdapat faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu investasi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi infrastruktur secara langsung melalui akumulasi modal, misalnya investasi

infrastruktur pada pengadaan jalan akan menurunkan biaya transportasi. Penurunan biaya akan menciptakan efisiensi terkait dengan kegiatan ekonomi, dan bila kegiatan ekonomi lebih efisien akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih besar secara keseluruhan, sudah sejak lama penyediaan infrastruktur yang tepat menjadi faktor penting bagi produktivitas dan pertumbuhan. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini peran infrastruktur menjadi perhatian yang menonjol bagi para pembuat kebijakan karena kepentingannya terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Fakayode *et al.*, (2008) mempelajari pentingnya penyediaan infrastruktur pedesaan untuk produktivitas pertanian di Nigeria. Mereka menemukan bahwa infrastruktur pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan sektor pertanian. Pasokan fasilitas infrastruktur yang memadai akan meningkatkan tingkat hasil pertanian petani. Bersamaan dengan pasokan infrastruktur sarana prasarana, masalah dalam mengaksesnya harus diperhatikan juga, karena bila terdapat akses sarana prasarana yang buruk akan mengakibatkan produktivitas pertanian yang rendah di daerah tersebut. Banyak sekali peneliti yang telah mengkaji tentang prasarana dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi juga dikaji oleh Sahoo, Dash and Nataraj (2010), menjelaskan bahwa di negara berkembang infrastruktur merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, baik untuk infrastruktur ekonomi maupun sosial.

Namun, temuan ini telah dipertanyakan atas dasar metodologis dan tingginya tingkat pengembalian investasi infrastruktur yang dilaporkan sering dianggap tidak masuk akal. Salah satu peringatan utama dari studi sebelumnya, pada tingkat yang

lebih kecil, beberapa studi selanjutnya adalah kegagalan untuk memperhitungkan non-stasioneritas data, yang dapat menyebabkan masalah regresi palsu, alasan yang mungkin untuk estimasi tinggi yang tidak realistis produktivitas infrastruktur (Gramlich, 1994). Beberapa penelitian mencoba untuk menghindari masalah ini dengan mengubah data menjadi perbedaan pertama, tetapi dengan mengorbankan hubungan jangka panjang (Munnell, 1992). Masalah lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kausalitas balik antara output dan investasi infrastruktur. Kegagalan memperhitungkan masalah berisiko mencampuradukkan perkiraan elastisitas output infrastruktur dengan elastisitas pendapatan dari permintaan layanan infrastruktur, yang menyebabkan hasil estimasi yang bias.

Menurut Bank Dunia (1994), “investasi infrastruktur ada pada sendiri mungkin tidak cukup untuk menghasilkan kontribusi signifikan untuk mendorong perekonomian”. Hal yang sama dengan (McGuire, 1992; Garcia-Mila, T., McGuire, T.J. and Porter, 1996) juga memberikan beberapa bukti untuk dampak tidak signifikan atau bahkan negatif dari pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Gramlich (1994), manfaat ekonomi dari infrastruktur dapat diimbangi oleh biaya yang berlebihan ketentuannya. Quiggin, (1996) menekankan bahwa konstruksi proyek infrastruktur mungkin menghasilkan eksternalitas negatif seperti polusi dan sosial biaya yang semakin mengurangi keuntungan ekonomi. Masalahnya bahkan lebih parah jika publik dan modal swasta adalah pengganti, membuat investasi infrastruktur berdampak buruk pembangunan ekonomi (Tatom, 1991).

Senada dengan Amalia, Rahmah; Madris dan Razak (2015) pengeluaran pemerintah kabupaten berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten tidak cukup

besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengeluaran pemerintah utamanya bagi daerah yang baru berkembang lebih difokuskan pada kegiatan administrasi dan pembangunan infrastruktur bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kapunda and Topera (2013) menjelaskan bahwa belanja infrastruktur tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan lebih banyak penekanan pada investasi di sektor infrastruktur seperti jalan, bandara, listrik, telekomunikasi, teknologi informasi, kereta api, pelabuhan dan pasokan air. Ada beberapa studi empiris yang menyelidiki secara empiris bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah (Jadhav, Pani and Katti, 2020).

Stupak (2018), peningkatan pengeluaran infrastruktur oleh pemerintah pada umumnya diharapkan menghasilkan output ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka pendek dengan merangsang permintaan dan jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dampak jangka pendek pada output ekonomi sebagian besar tergantung pada jenis pembiayaan (apakah defisit dibiayai atau defisit netral) dan keadaan ekonomi (baik dalam resesi atau ekspansi). Dampak jangka panjang pada output ekonomi juga dipengaruhi oleh metode pembiayaan, karena potensi untuk "*crowding out*" dari investasi swasta ketika investasi dibiayai defisit. Jenis infrastruktur juga diperkirakan akan mempengaruhi berdampak pada output ekonomi. Investasi dalam infrastruktur inti, yang didefinisikan sebagai jalan, kereta api, bandara, dan utilitas, diharapkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih

besar dalam output ekonomi daripada investasi di beberapa jenis infrastruktur yang lebih luas, seperti rumah sakit, sekolah, dan bangunan umum lainnya. Perubahan dalam output ekonomi diharapkan memiliki efek selanjutnya pada lapangan kerja; Dengan demikian, investasi infrastruktur cenderung berdampak pada lapangan kerja juga. Penelitian terbaru menunjukkan pengurangan sederhana dalam tingkat pengangguran sebagai respons terhadap peningkatan investasi infrastruktur.

Agenor and Moreno-Dodson (2006), menjelaskan salah satu mekanisme transmisi yang dilalui infrastruktur memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, infrastruktur dapat memiliki pengaruh pertumbuhan yang signifikan dengan memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia, terutama di negara berkembang. Akses ke air bersih, sanitasi, listrik dan fasilitas perawatan kesehatan merupakan faktor penentu kesehatan yang penting. Akses ke fasilitas pendidikan merupakan penentu utama hasil pendidikan; Selain itu, akses ke air bersih dan sanitasi meningkatkan kehadiran di sekolah, terutama anak perempuan. Akses ke listrik adalah penentu signifikan lainnya dari hasil pendidikan, baik dengan memungkinkan jam belajar yang lebih lama dan memungkinkan penggunaan peralatan elektronik dalam pengajaran. Dan ada keterkaitan yang memperbesar efek ini: anak-anak dan orang dewasa yang sehat belajar lebih baik, dan orang-orang yang berpendidikan lebih sehat.

Infrastruktur memiliki peran yang vital dalam pembangunan manusia, Mohanty, Nayak and Chatterjee (2016), meneliti apakah Infrastruktur memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia di 30 distrik Odisha, dari hasil studinya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan manusia di Odisha. Di samping itu menguji dampak indeks infrastruktur

komposit dan komponen individu pada pembangunan manusia dan tiga dimensinya. Studi ini membangun hubungan erat antara infrastruktur dan pembangunan manusia. Telekomunikasi, layanan pos, listrik desa, perbankan, sekolah, PTR dan air minum fasilitas memainkan peran penting dalam proses mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Dengan demikian, Untuk mencapai tinggi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, negara perlu memprioritaskan upayanya menuju penciptaan infrastruktur.

Mayanja Lwanga and Maweje (2014), menjelaskan bahwa pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas dalam perekonomian jika ia membelanjakan lebih banyak pada pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan tetapi akan dianggap boros jika pengeluaran pemerintah dipusatkan pada perjalanan yang berlebihan dan partisipasi konferensi oleh pejabat pemerintah yang biasanya terjadi di sebagian besar parastatal pemerintah di Nigeria. Ini tidak akan menghasilkan percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama untuk negara berkembang seperti Nigeria karena itu, pemerintah dihadapkan dengan tugas mengalokasikan pengeluaran dengan tepat ke berbagai segmen ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan.

6. Hubungan Antara Belanja Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu investasi yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Schultz, 1961; Becker, 1962; Uzawa, 1965; Rosen, 1976; Becker, Murphy and Tamura, 1990; Todaro and Smith, 2009, 2015). Pendidikan menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan

pekerjaan. Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penduduk terampil akan menunjukkan potensi yang besar untuk memulai proses pertumbuhan.

Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Lucas (1988) dan Romer (1997), yang mengedepankan pentingnya kebijakan sektor sosial (publik), yang sebagian besar berfokus pada peningkatan pembangunan manusia dan merupakan penyempurnaan dari teori neoklasik yang mengansumsikan kemajuan teknologi eksogen sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya menurut Barro (1991), kemajuan perkembangan manusia ditemukan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sektor pendidikan merupakan sektor prioritas pemerintah Indonesia, di mana diamanatkan mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pendidikan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan nasional yang dapat direalisasikan dengan baik. Selain besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah sampai sekarang ini, sebagai bukti perhatian besar pemerintah terhadap sektor pendidikan. Juga dapat dilihat dari realisasi program-program pendidikan misalkan pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, program beasiswa bagi siswa tidak mampu yang juga terus berjalan hingga saat ini, akan tetapi perbaikan anggaran pendidikan ini belum dapat dirasakan langsung untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Perbaikan pendidikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebuah studi oleh Becker, Murphy and Tamura (1990), pengeluaran untuk peningkatan pendidikan terbukti menjadi keharusan konstitusi di hampir seratus

negara. Blundell *et al.*, (1999), menguji keunggulan terampil dan angkatan kerja terdidik untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam studi tersebut, pendidikan ditemukan menjadi faktor deskriptif penting pada umumnya dan pendidikan tinggi sebagai faktor yang paling relevan khususnya di negara maju. Patel and Annapoorna (2019) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai faktor penting untuk pengembangan sumber daya manusia dan investasi di bidang pendidikan sebagai strategi pembangunan manusia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Li *et al.*, (2017), menjelaskan bahwa di Cina hampir semua anak mulai dari tingkat sekolah dasar dan menengah diberikan pendidikan yang memadai, dengan matematika dasar dan keterampilan bahasa serta pelatihan dengan tujuan membangun kapasitas besar dengan upah rendah, tenaga kerja berketerampilan rendah kekuatan yang dibutuhkan untuk sektor manufaktur, yang telah mendorong pertumbuhan China dari 1980-an hingga awal 2000-an. Tapi tenaga kerja ini tidak bisa dianggap sebagai sumber daya manusia karena kurangnya keterampilan tinggi dan bakat inovatif. Sehingga disarankan untuk lebih menekankan pada investasi dalam modal manusia yang mereka pertimbangkan sebagai pendorong yang lebih signifikan bagi pertumbuhan masa depan Cina. Mallick, Das, Pradhan (2016), menganalisis hubungan pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di 14 Negara utama Asia, yaitu Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Turki dari tahun 1973 sampai 2012. dengan menggunakan uji kointegrasi panel, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara terpilih. Sejalan dengan Baldacci *et al.*, (2008), Nurudeen and Usman (2010), Stephen and Oluranti (2011), Mercan and

Sezer (2014), Awaworyi, Yew and Ugur (2015), belanja pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun berbeda Olulu, Erhieyovwe and Andrew (2014), bahwa secara keseluruhan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nurudeen and Usman, (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Patricia and Izuchukwu (2013) menganalisis dampak pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria menggunakan periode 1977 hingga 2012. Temuan mereka mengungkapkan korelasi jangka panjang yang positif dan signifikan antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Lahirushan and Gunasekara (2015) menyelidiki hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia menggunakan data sekunder dari tahun 1970 hingga 2013. Hasilnya menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara variabel sasaran. LI and HUANG (2009), mencatat hubungan positif antara pengeluaran di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Cina selama periode 1978–2005.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dampak belanja publik khususnya bidang pendidikan terhadap pembangunan manusia. Diawali Aschauer (1989) meneliti produktivitas belanja pemerintah. Mempertimbangkan hubungan antara produktivitas agregat dan stok dan aliran variabel pengeluaran pemerintah hasil empiris menunjukkan bahwa persediaan modal publik non militer jelas lebih penting menentukan produktivitas daripada aliran pengeluaran militer. Dalam rangkaian

penelitiannya, Sen (1993, 2000) membahas masalah bagaimana pengeluaran di sektor sosial meningkatkan kemampuan warga dan dengan demikian memperkuat pembangunan manusia.

Bhatia and Dash (2011) mengamati bahwa sebagian besar negara maju yang telah mencapai tujuan pendidikan menghabiskan proporsi PDB yang lebih tinggi untuk pendidikan sementara negara-negara di bawah dan sedang berkembang diharuskan untuk memperluas dan meningkatkan alokasi sumber daya untuk sektor pendidikan. Bhatia and Dash (2011) menunjukkan bahwa HDI India dan juga pengeluaran untuk pendidikan oleh pemerintah dulu sangat rendah. Mereka menyarankan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang merupakan komponen esensial pendidikan, para pengambil kebijakan harus merencanakan fasilitas pendidikan gratis sampai dengan tingkat kelulusan, yang secara langsung mengindikasikan besarnya belanja publik untuk pendidikan. Namun, pemuda India dapat menjadi aset hanya jika pemerintah berinvestasi cukup dalam pembangunan kapasitas mereka, jika tidak, mereka akan menjadi beban bagi masyarakat.

Edeme (2014; 2017) menganalisis pengaruh pengeluaran publik sektoral terhadap pembangunan manusia di Nigeria menggunakan data dari 20 negara bagian untuk periode 1999-2012, Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat hubungan fungsional yang positif antara pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, perumahan, perlindungan lingkungan dan pengeluaran sumber daya air portabel dengan pembangunan manusia; sebuah indikasi bahwa pengeluaran pada sektor-sektor ini mendorong pembangunan manusia.

Mohanty and Bhanumurthy (2018), menilai efisiensi belanja publik pada sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan dengan penggabungan indikator tata kelola. Hasil mengungkapkan bahwa negara bagian membelanjakan sumber daya mereka secara lebih efisien untuk pendidikan selain pada kesehatan dan juga kualitas pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi efisiensi pendidikan, kesehatan, dan sosial yang pada akhirnya akan berdampak membantu dalam meningkatkan besarnya pembangunan manusia.

7. Hubungan Antara Belanja Kesehatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia

Kesehatan dapat diakui sebagai unsur fundamental lainnya dari modal manusia (misalnya Schultz, 1961; Bloom, Canning and Sevilla, 2001; Barro, 2013), modal manusia sering kali dibatasi hanya pendidikan dalam literatur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peningkatan produktivitas angkatan kerja, di mana kesehatan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan variabel kesehatan sebagai barang modal dalam modelnya, Grossman (1972) berpendapat bahwa orang dilahirkan dengan dana abadi kesehatan awal yang menurun seiring waktu tetapi dapat tumbuh dengan investasi masuk kesehatan. Grossman menunjukkan bahwa peningkatan modal kesehatan akan meningkatkan harapan hidup, dengan demikian, kesehatan memungkinkan kinerja yang lebih efektif yang meningkatkan produktivitas.

Jack (1999), menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja tergantung pada investasi dalam modal manusia, fisik dan kemampuan mental tenaga kerja. Pekerja yang lebih sehat secara fisik dan mental lebih energik dan kuat. Mereka lebih produktif dan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Mereka juga kecil

kemungkinannya untuk mangkir dari pekerjaan karena penyakit (atau penyakit dalam keluarga mereka). Penyakit dan disabilitas mengurangi upah per jam secara substansial, dengan efek yang sangat kuat dalam perkembangan negara, di mana proporsi yang lebih tinggi dari tenaga kerja terlibat dalam tenaga kerja manual dari di negara industri. Sebagaimana telah dibuktikan Strauss *et al.*, (1998) bahwa hubungan antara produktivitas dan kesehatan.

Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Romer (1986), Lucas (1988), Barro (1991) dan Barro and Sala-i-Martin (1995) yang menekankan faktor penting produksi dalam kaitannya dengan pertumbuhan jangka panjang adalah modal manusia. Setiap aktivitas yang meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, seperti kesehatan (penciptaan kondisi yang memungkinkan individu menjadi sehat di negara tempat mereka tinggal) penting dalam hal sumber daya manusia.

Sementara peningkatan pengeluaran kesehatan meningkatkan kualitas hidup individu, mereka juga menyediakan layanan sosial manfaat bagi seluruh komunitas. Peningkatan produksi yang terjadi karena konsumsi yang lebih tinggi oleh individu yang sehat memberikan kontribusi baik bagi individu maupun masyarakat. Pengurangan produksi sosial dengan tidak sehat individu juga berarti pengurangan pendapatan nasional di tingkat makro dan perampangan ekonomi. Karena itu, Pengeluaran yang dikeluarkan untuk kesehatan penting di antara pengeluaran publik. Setiap peningkatan sumber daya yang dialokasikan layanan kesehatan akan memastikan individu untuk hidup lebih lama, meningkatkan produktivitas mereka dan membuat mereka tetap tinggal produktif dalam kehidupan kerja lebih lama. Individu-individu ini akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa ekonomi dengan kemungkinan perluasan anggaran akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya kesehatan.

Senada dengan Nwani and Kelikume (2019), dampak pengeluaran kesehatan pada arus pertumbuhan mengakibatkan pengeluaran kesehatan masyarakat yang lebih tinggi layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan permintaan perawatan kesehatan karena keterjangkauan, angka harapan hidup yang tinggi, produktivitas yang meningkat, keterampilan yang lebih baik, dan pendidikan, modal pembangunan manusia yang berarti pendapatan yang lebih tinggi penghasilan, peningkatan konsumsi dan investasi, dengan demikian, mengakibatkan permintaan agregat yang lebih tinggi (pertumbuhan ekonomi).

Pemerintah memainkan peran penting dalam investasi di pendidikan dasar dan perawatan kesehatan dasar negara, melalui undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 171 diatur kewajiban bagi negara mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk bidang kesehatan diluar gaji tenaga kesehatan serta memerintahkan pula pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyisihkan minimal 10 persen dari APBD. Anggaran untuk sektor kesehatan merupakan salah satu *mandatory spending* di Indonesia yang alokasi belanjanya sudah diatur dalam undang-undang dan ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan penanganan dan pencegahan gizi buruk (*stunting*), serta penguatan program dari pemerintah dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, diharapkan alokasi anggaran kesehatan dari pemerintah provinsi dapat meningkatkan pembangunan manusia dari sisi kesehatan.

Belanja kesehatan yang dialokasikan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, Pembangunan dan perbaikan puskesmas dan pusku, Penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas serta obat-obatan yang cukup akan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, ketersediaan akses kesehatan yang memadai dapat meningkatkan output sektor kesehatan.

Secara empiris pengaruh belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas dibandingkan belanja pendidikan. Piabuo and Tieguhong (2017), menganalisis tentang dampak pengeluaran kesehatan antara negara-negara di sub-wilayah CEMAC dan lima Afrika lainnya, dengan menggunakan *Database Development Indicators* (2016), *panel ordinary least square* (OLS), *ordinary least square* yang sepenuhnya dimodifikasi (FMOLS) dan *dynamic ordinary least square* (DOLS) digunakan sebagai teknik analisis ekonometri. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jamison, Lau and Wang (2004), menggunakan data dari negara berkembang dan maju pada 1965-1990, menemukan bahwa peningkatan dalam kesehatan mencapai sekitar sepersepuluh pertumbuhan ekonomi. Rivera and Currais, (1999a; 1999b) dan Beraldo, Montolio and Turati, (2005) menggunakan pengeluaran kesehatan sebagai bagian dari PDB di negara-negara OECD dan melaporkan dampak kesehatan yang signifikan secara statistik pengeluaran untuk pertumbuhan.

Khan *et al.*, (2016) menetapkan bahwa ada kausalitas searah antara pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di negara SAARC tertentu dengan menggunakan panel uji kointegrasi dan kausalitas. LI and HUANG (2009), mencatat

hubungan positif antara investasi di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Cina selama periode 1978–2005.

Sejalan dengan beberapa penelitian yang mendukung pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan dengan pertumbuhan diantaranya Sethi *et al.*, (2020), Kurt (2015), Baldacci *et al.*, (2008), Nurudeen and Usman, (2010), Stephen and Oluranti, (2011), Mercan and Sezer (2014); Lago-Peñas, Cantarero-Prieto and Blázquez-Fernández (2013); Eryigit, Eryigit and Selen (2012); Narayan, Narayan and Mishra (2010) dan Bloom, Canning and Sevilla (2001, 2004). Namun di sisi lain, beberapa studi empiris yang menemukan belanja kesehatan berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Olulu, Erhieyovwe and Andrew (2014), bahwa secara keseluruhan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama juga ditunjukkan dari Al-Shatti (2014), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Cooray (2013) menggunakan OLS dan *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk menganalisis perbedaan efek kesehatan pada pertumbuhan ekonomi untuk sampel dari 210 negara menggunakan data panel selama periode 1990-2008. Hasil untuk sampel penuh menunjukkan bahwa modal kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama dengan Anochiwa, Obila and Enyoghasim (2019), melakukan pemodelan efek pengeluaran perawatan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria: Analisis ekonometrik *three stage -least -square*

(3SLS), hasil risetnya menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Awaworyi, Yew and Ugur (2015), dengan menggunakan meta-analisis meneliti pengaruh pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan SERİM, Nilgün and Kurt (2018), Bokhari; *et.al*, (2007) dan Rajkumar and Swaroop (2008).

Iheoma (2014) bertujuan untuk memeriksa apakah pengeluaran sosial mampu memastikan pembangunan manusia untuk negara-negara Afrika sub-Sahara tertentu dalam kerangka data panel. Hasil menunjukkan bahwa hanya belanja kesehatan masyarakat dan pendidikan tinggi penting dalam menjelaskan perkembangan manusia di negara-negara ini. Razmi, Abbasian, and Mohammadi (2012) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan pemerintah dan HDI.

Razmi, M. J., Abbasian, E and Mohammadi (2012), Studi ini mengkaji pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (HDI) oleh menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) selama periode 1990-2009 di Iran. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara pemerintah pengeluaran kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Namun berbeda dengan Haque and Khan (2019) menemukan hubungan yang signifikan dan negatif untuk pengeluaran kesehatan dengan HDI.

8. Hubungan Antara Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kualitas Pembangunan Manusia

Di dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, terdapat dua teori yang kontradiktif, yaitu teori klasik dan teori keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan *necessary condition* bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran, maka hal tersebut hanyalah bersifat sementara, dan dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar, karena kaum klasik berasumsi bahwa perekonomian tidak akan kekurangan permintaan *agregat*.

Kaum klasik menyatakan bahwa tingkat harga dan upah di dalam perekonomian dianggap fleksibel, artinya harga barang dan upah tenaga kerja dengan cepat menyesuaikan. Namun kesempatan kerja menurut Keynes berbeda dengan klasik. Menurut Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada permintaan, yaitu tergantung kepada pengeluaran agregat untuk membeli barang dan jasa atau kegiatan yang dihasilkan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode

tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu (jangka pendek). Serta Keynes sejalan dengan klasik pada tingkat harga dan upah yang fleksibel dalam jangka panjang.

Semakin besar permintaan agregat (perbelanjaan agregat) yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Permintaan agregat yang wujudnya tidak selalu mencapai tingkat permintaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh maka dari itu pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mempengaruhi permintaan agregat, yang dilakukan dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dengan demikian dapat dibangun asumsi bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka kesempatan kerja mengalami kenaikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kesempatan kerja pun akan mengalami penurunan.

Upah merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga atas penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi. Upah yang diberikan dapat berbentuk uang, barang, atau jasa serta fasilitas umum. Teori upah tidak terlepas dari teori dana upah yang dikembangkan Jhon Stuart Mill (1806 – 1873). Menurut Mill, bahwa tinggi atau rendahnya upah tergantung dari ketersediaan jumlah modal yang digunakan untuk pembayaran upah. Banyaknya penawaran tenaga kerja akan menyebabkan tingkat upah menjadi rendah, demikian pula ketika keuntungan perusahaan menurun maka tingkat upah akan ikut menurun. Mill juga percaya bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam urusan kegiatan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan bahwa jika di masyarakat tersedia dana upah untuk pembayaran upah,

yang mana pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu jadi tingkat upah tidak berubah jauh dari alokasi tersebut.

Dalam teori ekonomi makro Case dan Fair (2004), dikatakan bahwa pengangguran (*unemployment*) merupakan masalah besar perekonomian makro, bila pengangguran meningkat adalah masalah besar dalam ekonomi makro, dan pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang dikurangi mereka yang memperoleh pekerjaan biasa disebut pekerja (*employment*), maka masalah besar lainnya adalah bagaimana perekonomian meningkatkan jumlah atau persentase pekerja dari angkatan kerja yang ada. Jika pekerja sudah memperoleh pekerjaannya, ada permasalahan yang menjadi rentetannya, yaitu bagaimana membuat pekerja tetap bekerja pada pekerjaannya (*job duration*).

Dalam teori penawaran neoklasik masih sejalan dengan klasik, bahwa upah menyesuaikan diri secara seketika untuk menjamin output selalu berada pada kondisi *full-employment*. Tetapi output tidak selalu pada tingkat *full-employment*, dan kurva Phillips menyatakan bahwa upah menyesuaikan diri dengan lamban sebagai respon terhadap perubahan dalam pengangguran. Pernyataan utama pada teori penawaran agregat adalah, mengapa upah nominal lamban menyesuaikan diri terhadap pergeseran dalam permintaan. Dengan kata lain kenapa upah begitu kaku (*rigid*), Upah tidak fleksibel, atau penyesuaian upah terjadi perlahan-lahan, ketika upah bergerak secara lamban sepanjang waktu, akan susah dicapai fleksibilitas dengan cepat dan penuh, sedemikian rupa agar dapat menjamin *full-employment* selalu terjadi setiap saat (Dornbusch and Rudiger, 2004). Neo klasik menjelaskan bahwa tingkat upah dapat saja dinaikkan asal sesuai dengan *marginal product*, maka tingkat upah cenderung sama dengan nilai pasar dari *marginal product* sehingga pada tingkat mikro

tenaga kerja tidak homogen dengan kata lain bahwa setiap tenaga kerja terdapat satu tingkat *marginal product* dan satu tingkat upah (Koutsoyiannis, 1982; Varian, 1992).

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Alasan perusahaan menginginkan untuk memberikan upah yang tinggi, merupakan keputusan yang tidak lazim didengar karena upah merupakan bagian besar dari biaya perusahaan. Namun yang lazim kita dengar perusahaan-perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya termasuk upah seefisien mungkin. Teori upah efisiensi menjelaskan dengan membayar upah yang tinggi dapat menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan perusahaan.

Menurut Mankiw, Quah, and Wilson (2013) menjelaskan ada beberapa jenis teori upah efisiensi, untuk menjelaskan mengapa perusahaan mau membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja, diantaranya: *Pertama* Kesehatan Pekerja. Teori upah efisiensi yang berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin lebih menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif. Jenis teori upah efisiensi ini tidak relevan untuk negara maju karena bagi Negara yang sudah maju dan kaya keseimbangan upah sebagian besar di atas tingkat untuk mengkonsumsi nutrisi yang berkecukupan, di sini

perusahaan tidak perlu ada kekhawatiran jika mereka membayar upah ekuilibrium kesehatan para pekerja mereka akan menurun. Jenis teori upah ini lebih relevan untuk negara berkembang karena sebagian besar pekerja di Negara berkembang kekurangan nutrisi merupakan masalah yang umum, dinegara-negara yang belum maju perusahaan mungkin merasa takut bahwa jika upah dipotong, kesehatan dan produktivitas kerja akan menurun.

Kedua, Perputaran Pekerja. Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan hubungan antara upah dengan perputaran kerja. Pekerja berhenti bekerja karena beberapa alasan pindah ketempat pekerjaan lain, pindah ke kota lain, meninggalkan angkatan kerja dal lain-lain. Frekuensi perputaran ini tergantung pada insentif-insentif yang mereka hadapi yaitu manfaat terus bekerja versus manfaat berhenti kerja. Semakin tinggi upah yang dibayar kepada tenaga kerja semakin rendah kemungkinan pekerja akan berhenti dari pekerjaannya, jadi sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi.

Alasannya kekhawatiran perputaran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru. Selain itu mereka telah dilatih para pekerja baru tidak seproduktif pekerja yang berpengalaman, perusahaan memiliki perputaran pekerjaan yang tinggi dengan demikian akan memiliki biaya produksi yang tinggi pula. Bagi perusahaan mungkin akan lebih menguntungkan apabila membayar upah pekerja di atas tingkat ekuilibrium dalam rangka mengurangi perputaran pekerja.

Ketiga, Kerja Keras Pekerja. Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara upah dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau

kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan dan tidak efisien. Sebuah perusahaan dapat menanggulangi masalah ini dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium. Upah yang lebih tinggi akan membuat pekerja lebih setia, dan dengan demikian memberikan insentif kepada pekerja untuk mencurahkan upaya dan pikiran mereka semaksimal mungkin.

Terakhir Kualitas Pekerja. Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara upah dengan kualitas pekerja. Saat merekrut tenaga kerja baru, sebuah perusahaan tidak bisa secara tepat mengukur kualitas dari para pekerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang lebih berkualitas. Dalam teori upah efisiensi ini ketika sebuah perusahaan menghadapi *suplay* pekerja yang berlebihan, mungkin tampak masuk akal dan menguntungkan untuk menurunkan upah yang ditawarkan. Tetapi dengan menurunkan upah, perusahaan beresiko kehilangan pekerja yang berkualitas.

Sejalan teori upah efisiensi Blackwell (2008), dengan kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja dapat digunakan untuk memperbaiki nutrisi sehingga dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai target produksinya sedangkan upah yang diterima oleh pekerja belum memberi pengaruh pada nilai produksi, karena masih terkait dengan permintaan pasar. Campbell, and Kamlani (1997) dengan Teori *Gift-Exchange Model* (Model Hadiah), karena upah yang lebih tinggi merupakan hadiah bagi pekerja, dan pekerja akan mengembalikan hadiah tersebut dengan produktivitas yang lebih tinggi. Hal yang sama dengan teori *Fair Wage-effort Model* (Model Keadilan) oleh (Agell, J. and Lundborg, 1995), jika pekerja dibayar dengan

upah rendah, atau tidak adil maka pekerja akan membalas dengan produktivitas yang rendah. Kemudian Helmers (2004) menegaskan, faktor kompensasi pada tenaga kerja merupakan input atau penentu nilai dari produksi. Hal yang sama Teori upah etika yang dikembangkan kaum Utopis, kaum yang mendambakan masyarakat ideal, upah diberikan secara etis, sehingga upah yang diterima harus bisa mendorong pekerja untuk hidup secara layak. Selain itu, teori ini juga menganjurkan perusahaan untuk memberikan tunjangan kepada pekerjanya.

Namun berbeda yang dijelaskan Sumarsono (2003) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Dengan asumsi jika upah naik, maka akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak akan membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, akibatnya berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan mengantikannya kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain.

Ketika upah minimum diberlakukan, maka upah pekerja di kelas satu akan meningkat sehingga perusahaan akan mengurangi penggunaan efek substitusi tenaga kerja yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan mesin Kaitz (1970). Ketika upah minimum meningkat, pasokan tenaga kerja muda akan meningkat tetapi

permintaan akan meningkat tenaga kerja muda berkurang sehingga terjadi pengangguran. Tingkat pengangguran kaum muda akan meningkat seiring dengan kenaikan upah minimum.

Menurut Simanjuntak (2001) upah memiliki pengaruh terhadap lapangan kerja. Jika lebih tinggi tingkat upah yang ditetapkan, hal itu menyebabkan naiknya biaya produksi. Untuk membuat efisiensi, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja, yang mengakibatkan rendahnya tingkat lapangan kerja. Senada dengan teori permintaan tenaga kerja jangka pendek untuk sebuah industri. Setiap perusahaan dalam persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi harga. Akan tetapi perusahaan dalam industri mengambil keuntungan dari upah yang lebih rendah dengan meningkatkan jumlah pekerja, yang berarti akan ada lebih banyak output yang dihasilkan. Banyaknya output akan menyebabkan penurunan harga output yang berarti bahwa nilai tambah produk marjinal juga akan turun, dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja untuk masing-masing perusahaan ke kiri (Borjas, 2010). Lebih lanjut Borjas menjelaskan kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek memiliki slop negatif, maka elastisitas tenaga kerjanya pun negatif. Misalkan upah mula – mula adalah \$20 dengan 56 pekerja. Apabila terjadi kenaikan upah hingga upah sekarang adalah \$30, maka elastisitas tenaga kerja akan turun sebesar -1,733.

Garloff (2019), upah minimum yang lebih tinggi terkait dengan tingkat pertumbuhan pekerjaan tetap yang lebih tinggi, upah minimum yang lebih tinggi terkait dengan tingkat pertumbuhan pekerjaan marjinal yang lebih rendah. Hasil ini sejalan dengan transformasi pekerjaan marjinal ke pekerjaan tetap. Hubungan dengan total pekerjaan sedikit positif dalam spesifikasi pilihan kami tetapi tidak signifikan atau negatif pada orang lain. Untuk pengangguran, dijelaskan bahwa hubungan positif

antara upah minimum dan pertumbuhan pengangguran dalam spesifikasi pilihan kami tetapi hasil yang tidak signifikan atau negatif pada spesifikasi lain. Wye and Bahri (2020) kenaikan upah minimum mengurangi perekrutan karena arus masuk investasi asing langsung meningkat, terlepas dari jumlah investasinya. Senada dengan Meer and West (2016) upah minimum dapat mengurangi lapangan kerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal yang sama didapatkan (Brown, 1982, 1999; Card and Krueger, 1995; Neumark, David; Wascher, 2008; Wang and Gunderson, 2011; Hoffman, 2014; Huang, Loungani and Wang, 2014; Neumark, Salas and Wascher, 2014; Baskaya, Y. S., & Rubinstein, 2015; Zipperer, 2016; Powell, 2017; Clemens and Wither, 2019) upah minimum berpengaruh negatif terhadap lapangan kerja.

Namun, beberapa penelitian yang menguji prediksi ini menemukan sangat kecil atau tidak ada pengaruh upah minimum pada tingkat pekerjaan (Card, 1994; Zavodny, 2000; Stewart, 2002, 2004; Dube, Lester and Reich, 2010; Hirsch, Kaufman and Zelenska, 2011; Addison, Blackburn and Cotti, 2012; Dolton, 2012; Giuliano, 2013; Schmitt, 2013; Fitzenberger and Doerr, 2016).

Stewart (2004), melakukan pengujian dampak upah minimum di Inggris pada tahun 1999, setelah periode tanpa minimum, dan kenaikan pada tahun 2000 dan 2001, menemukan tidak ada efek merugikan yang signifikan pada pekerjaan ditemukan baik untuk pengenalan atau pujian untuk salah satu kelompok demografis yang dipertimbangkan. Dube, Lester and Reich (2010), menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum tahun 1990 – 2006 di Amerika Serikat tidak menemukan efek yang merugikan, sehingga memungkinkan efek jangka panjang dari perubahan upah minimum.

Hirsch, Kaufman and Zelenska (2011) menganalisis dampak ekonomi dari kenaikan upah minimum federal (UM) 2007-2009 dengan menggunakan sampel restoran cepat saji di Georgia dan Alabama, tidak menemukan pengaruh signifikan dari kenaikan UM terhadap pekerjaan atau jam kerja berakhir tiga tahun. Di sisi lain (Neumark, Salas and Wascher, 2014; Addison, Blackburn and Cotti, 2015; Dolton, Bondibene and Stops, 2015) menemukan elastisitas lapangan kerja hanya kecil.

Meskipun bukti pengaruh upah minimum terhadap pekerjaan tetap beragam, ada bukti yang lebih konsisten yang menunjukkan bahwa upah minimum meningkatkan pendapatan untuk pekerja. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi berpendapat bahwa hal itu akan meningkatkan kesejahteraan individu berpenghasilan rendah, seperti pola makan yang lebih baik dan akses ke perawatan kesehatan yang dibutuhkan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan melalui pendapatan yang lebih tinggi. Kebanyakan penelitian setuju bahwa peningkatan upah minimum untuk pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja (Luttmer, 2007; Autor, Katz and Kearney, 2008; Aaronson, Agarwal and French, 2012; Autor, Manning and Smith, 2016), Seperti guncangan pendapatan lainnya, kenaikan upah minimum harus mengarah pada lebih banyak konsumsi barang-barang normal seperti makanan yang lebih sehat, dan investasi kesehatan yang lebih luas sambil mengurangi konsumsi barang-barang berkualitas rendah seperti makanan cepat saji.

Selain pendapatan, upah minimum juga berdampak pada harapan hidup terutama pada kinerja kesehatan (Conklin *et al.*, 2016; Komro *et al.*, 2016; Majid *et al.*, 2016; Bullinger, 2017; Wehby, Dave and Kaestner, 2020). Wehby, Dave and Kaestner (2020), Mengkaji dampak upah minimum di negara bagian terhadap kesehatan bayi, menemukan bahwa secara statistik terhadap pengaruh signifikan

antara kenaikan upah minimum dengan berat badan bayi saat lahir, disebabkan karena diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan janin. Dari segi mekanisme, kami tidak menemukan bukti bahwa penggunaan perawatan pranatal dan merokok selama kehamilan merupakan saluran di mana upah minimum meningkatkan kesehatan bayi.

Bullinger (2017) melakukan analisis tingkat negara bagian tentang tingkat kelahiran bagi mereka yang berusia 15-19 tahun dan menemukan bahwa kenaikan \$ 1 dalam upah minimum mengurangi tingkat kelahiran remaja sebesar 2 persen. Conklin *et al.*, (2016), Ada hubungan yang jelas antara upah minimum nasional dan kelebihan berat badan yang diukur pada wanita dewasa di negara berkembang. Majid *et al.*, (2016), Upah minimum dapat meningkatkan kesehatan anak di Negara sedang berkembang. Komro *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dikaitkan dengan penurunan berat badan lahir rendah dan kematian pasca kelahiran.

9. Komparasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Membahas indikator keberhasilan pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai kesenjangan, karena kesenjangan sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti yang dijabarkan Dudley Seer bahwa menurunnya tingkat kesenjangan pendapat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2009; 2015).

Debraj Ray menjelaskan konsep kesenjangan dengan "*how benefit of economy is distributed among people or region*" (Ray, 1998). Sementara Ravallion (2003), mengemukakan bahwa "*inequality is about the disparities in levels of living*". Dia kemudian membedakan kesenjangan menjadi 'kesenjangan relatif' dan

'kesenjangan absolut'. Kesenjangan relatif tergantung dari rasio pendapatan individu terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Sehingga, jika semua pendapatan naik dengan tingkat yang sama, maka kesenjangan relatif menjadi tidak berubah. Kesenjangan absolut merupakan pengukuran kesenjangan dengan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, serta perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Sehingga, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Karena perbedaan ini, yang pada akhirnya muncul istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Disparitas kinerja perekonomian regional dapat dikaji menggunakan tiga macam ukuran pertumbuhan antara lain pertumbuhan output, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan output per tenaga kerja (Armstrong and Taylor, 2000). Hal yang sama ketidaksetaraan daerah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu kesenjangan antara bagian barat dan timur Indonesia, yang dikenal sebagai KBI (Kawasan Barat Indonesia) dan KTI (Kawasan Timur Indonesia), ketimpangan antar provinsi, antar wilayah dalam satu propinsi, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Heryanah, 2017).

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Isu kesenjangan juga banyak disuarakan berkaitan dengan Jawa dan Luar Jawa atau Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembangunan ekonomi disinyalir lebih banyak dominan di pulau Jawa dan meninggalkan pulau lain terlantar. Begitu pula dengan isu KBI dan KTI, dimana pembangunan di KBI terasa lebih maju dibandingkan di KTI.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapatkan perhatian dan prioritas. Namun demikian, hingga kini pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kemampuan daerah di kawasan itu dalam keseluruhan upaya dan hasil pembangunan nasional masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia (KBI) pada umumnya. Hal ini tentunya dapat dimengerti karena sebahagian besar pusat perekonomian riil dan pasar beralokasi di KBI, Karena sebagai besar penduduk bermukim di kawasan ini, sehingga sebagian terbesar kegiatan perekonomian riil memang sejalan dengan mekanisme pasar.

Pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, jika pengelolaannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ariza, 2016). Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kualitas pembangunan manusia sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia. Senada dijelaskan Anand and Ravallion (1993), sarana paling efektif mendorong pembangunan manusia melalui anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris mengenai pengeluaran pemerintah (belanja infrastruktur, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan) serta upah minimum provinsi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja baik di negara-negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia. Hasil riset antara riset satu dengan lainnya bervariasi. Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi diawali Aschauer (1989) yang meneliti mengenai dampak investasi publik terhadap produktivitas sektor swasta di Amerika Serikat periode 1949 – 1985 dengan menggunakan output nasional di Amerika Serikat sebagai variabel Independen menggunakan modal privat (*private capital*), tenaga kerja (*employment*), dan modal publik (*public capital*) sebagai variabel dependennya, serta mengasumsikan tingkat teknologi bersifat konstan.

Dalam penelitiannya Aschauer menggunakan model produksi Cobb- Douglas, dan hasilnya ternyata bahwa terdapat korelasi yang positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas output yang dihasilkan. Dari penelitian ini Aschauer mendapatkan hasil yang menjelaskan bahwa elastisitas modal publik adalah sebesar 0,39, ini berarti peningkatan 1% dari stok modal publik di USA akan meningkatkan 0,39 % pada produksi (output). Aschauer mendapatkan hasil bahwa infrastruktur mempunyai elastisitas yang lebih besar dari tenaga kerja. Dengan kata lain, penambahan investasi pada infrastruktur publik akan meningkatkan output nasional yang lebih besar dari pada investasi pada tenaga kerja. Lebih jauh lagi, *core infrastructure* seperti transportasi, energi, dan air, mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada infrastruktur lain seperti bangunan dan rumah sakit. Dengan hasil ini Aschauer menyimpulkan bahwa rendahnya investasi pada kapital publik merupakan faktor utama dalam rendahnya pertumbuhan produktivitas USA pada akhir 1970 dan 1980. Walaupun masih terdapat beberapa kontroversi pada metode penelitiannya yang menggunakan data time-series dan interpretasi hasilnya, namun penelitian yang

telah dilakukan telah menarik perhatian para pembuat kebijakan mengenai pentingnya investasi sektor publik.

Luu *et al.*, (2019) menyelidiki secara empiris dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (studi empiris di Vietnam). Dengan menggunakan pendekatan analisis data panel selama periode 2003-2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur secara konsisten memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan Ebu *et al.*, (2019) bahwa peningkatan infrastruktur keuangan dan stok infrastruktur merangsang ekspansi ekonomi riil jangka panjang dalam konteks Nigeria.

Abu Bakar and Che Mat (2017), menguji pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di negara bagian utara Malaysia yaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak. Indeks pengembangan infrastruktur dikembangkan dengan menggabungkan empat indikator utama dengan beberapa sub indikator dan menggunakan analisis komponen utama (PCA). Indeks pembangunan infrastruktur kemudian digunakan bersama dengan variabel lain seperti tenaga kerja dan investasi modal untuk memperkirakan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menggunakan uji spesifikasi Hausman, model efek acak dipilih untuk memperkirakan dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keempat negara. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan lebih banyak penekanan pada investasi di sektor infrastruktur seperti jalan, bandara, listrik, telekomunikasi, teknologi informasi, kereta api, pelabuhan dan

pasokan air. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah (Jadhav, Pani and Katti, 2020).

Stupak (2018), peningkatan pengeluaran infrastruktur pada umumnya diharapkan menghasilkan output ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka pendek dengan merangsang permintaan dan jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dampak jangka pendek pada output ekonomi sebagian besar tergantung pada jenis pembiayaan (apakah defisit dibiayai atau defisit netral) dan keadaan ekonomi (baik dalam resesi atau ekspansi). Dampak jangka panjang pada output ekonomi juga dipengaruhi oleh metode pembiayaan, karena potensi untuk "*crowding out*" dari investasi swasta ketika investasi dibiayai defisit. Jenis infrastruktur juga diperkirakan akan mempengaruhi berdampak pada output ekonomi. Investasi dalam infrastruktur inti, yang didefinisikan sebagai jalan, kereta api, bandara, dan utilitas, diharapkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam output ekonomi daripada investasi di beberapa jenis infrastruktur yang lebih luas, seperti rumah sakit, sekolah, dan bangunan umum lainnya. Perubahan dalam output ekonomi diharapkan memiliki efek selanjutnya pada lapangan kerja; Dengan demikian, investasi infrastruktur cenderung berdampak pada lapangan kerja juga. Penelitian terbaru menunjukkan pengurangan sederhana dalam tingkat pengangguran sebagai respons terhadap peningkatan investasi infrastruktur.

Quattara and Zhang (2019), menyelidiki dengan menggunakan data panel dari 29 provinsi di Cina selama periode 1985-2012, ia menyusun indeks infrastruktur sintesis dan menggunakan teknik deret waktu panel. Temuan menunjukkan bahwa infrastruktur, secara rata-rata, merupakan penentu yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan bahwa terdapat perbedaan provinsi dalam produktivitas marjinal

infrastruktur yang mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam kekurangan relatif atau penyediaan stok infrastruktur yang berlebihan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menggunakan investasi infrastruktur sebagai sarana untuk meningkatkan output atau mendorong pembangunan daerah hanya sepanjang tidak menyebabkan kelebihan pasokan infrastruktur.

Agbonkhese, Abraham Oni; Asekome (2014), dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS), untuk membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dari tahun 1980 hingga 2011 menemukan bahwa pengeluaran rutin dan modal pemerintah secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hermes and Lensink (2001) menganalisis kebijakan fiskal termasuk belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebagai variabel independen secara simultan di 33 negara berkembang. Studi tersebut menemukan infrastruktur itu pengeluaran, pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Al-Fawwaz (2015), untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Yordania selama periode 1980-2013. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka model regresi linier berganda, menghubungkan variabel penelitian digunakan. Kemudian model tersebut dianalisis menggunakan model OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dampak positif baik untuk total belanja pemerintah maupun belanja pemerintah saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung model Keynesian. Berdasarkan temuan analisis empiris, penelitian tersebut merekomendasikan agar belanja modal pemerintah diarahkan terutama untuk ekonomi produktif saat ini kegiatan dalam rangka mendorong kegiatan di sektor ekonomi.

Mallick (2016), menganalisis hubungan pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi 14 Negara di Asia, yaitu Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Turki dari tahun 1973 sampai 2012. dengan menggunakan uji kointegrasi panel, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara terpilih.

Barro (1991), dengan menggunakan data *cross section* dari 98 negara untuk jangka waktu antara 1960-1985, menggunakan tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil rata-rata tahunan dan rasio konsumsi pemerintah dan menyimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah negatif dan signifikan. Hal sama yang didapatkan Gifari (2016), meneliti di Malaysia dengan menggunakan teknik OLS untuk menemukan efek tetap dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi selama 45 tahun terakhir, menjelaskan bahwa ada korelasi negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama 45 tahun terakhir. Apalagi itu klasifikasi pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa hanya pengeluaran sektor perumahan dan pengeluaran pembangunan secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Pendidikan, pertahanan, layanan kesehatan, dan pengeluaran operasional tidak menunjukkan bukti signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini dapat memberikan gambaran umum tentang implikasi kebijakan terhadap Malaysia pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan dampak pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan Jeff-Anyeneh and Ibenta (2019), melakukan penelitian di Nigeria periode 1981 - 2016, menggunakan *Autoregressive Distributive Lag* (ARDL) Co-integrasi dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan Pengeluaran pemerintah yang jumlahnya lebih dari 70% dari total pengeluaran, namun tidak ada pengaruh yang sepadan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya, perlu ada pembuat kebijakan meninjau komposisinya dengan memastikan modal pengeluaran menghabiskan setidaknya 50% dari total tahunan pengeluaran. Olaoye, C.O & Oladipo (2019), menguji hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria; dari periode 1986-2016. Hasil yang diperoleh dari analisis kami mengungkapkan bahwa ada sedikit atau tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran publik riil Nigeria dan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 1986-2016.

Misini and Badivuku-Pantina (2017), meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Kosovo, Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bawah PDB nominal berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kosovo, hal ini mensyaratkan pemerintah harus melakukan perubahan radikal dalam proses pendekatan terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan aturan hukum. Ini akan mempengaruhi kenaikan investasi asing di negara ini, secara tidak langsung membantu dan merangsang bisnis yang mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, membantu bisnis pertanian, dengan mengubah pendekatan publik investasi.

Ajakaiye *et al.*, (2016), meneliti hubungan antara pertumbuhan dan kesempatan kerja di Nigeria. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan Nigeria selama dekade terakhir telah 'menganggur' dan berkelanjutan sebagian besar berdasarkan realokasi faktor daripada peningkatan produktivitas. Realokasi tenaga

kerja memiliki sebagian besar berasal dari pertanian dan manufaktur menuju sektor jasa rendah produktif. Elastisitas ketenagakerjaan dari pertumbuhan adalah positif dan cukup rendah, mencerminkan keseluruhan negara yang miskin catatan penciptaan lapangan kerja, terutama di bidang manufaktur. Sejalan dengan Hull (2009) menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan kunci yang penting untuk mengatasi kemiskinan, karena dampak dari adanya infrastruktur dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan baru.

Kiran. R, Subashini K (2014) mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja di India, di jelaskan bahwa PDRB dan pendapatan per kapita tumbuh tetapi lapangan kerja tidak tumbuh dalam rasio pertumbuhan PDB. Ada perbedaan pendapatan yang tumbuh di antara berbagai kelompok pendapatan. Oleh karena itu, konsentrasi kekuatan ekonomi tumbuh di negara yang merupakan tantangan untuk pertumbuhan yang adil untuk dilakukan. Upaya perlu dilakukan untuk mengurangi perbedaan dalam kelompok pendapatan.

Al-Dala'ien and Alamro (2016) mengukur dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Yordania ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang selama periode (1980-2011) dengan menerapkan hukum Okun. Itu hubungan diukur dengan melakukan model celah dengan filter Hodrick-Prescott (filter HP) untuk menghitung potensi produk domestik bruto. Untuk tujuan ini, *Autoregressive Distributed Lag Approach (ARDL)*, kointegrasi dan *Error Correction Model (ECM)* digunakan untuk mewakili jangka pendek dan jangka panjang. hubungan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif jangka pendek dan jangka panjang yang lemah pengangguran.

YAHIA (2018), menyelidiki keberadaan hubungan Okun (1962) di Aljazair untuk periode 1970-2015. Dua metodologi digunakan untuk memperkirakan Okun koefisien: Model *linier Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dan Bayesian Model Regresi Linear Normal. Dengan menggabungkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 1) analisis data selama periode 1970-2015 menunjukkan korelasi negatif antara perubahan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, 2) Dengan menggunakan model lag terdistribusi autoregresif, diperoleh untuk koefisien Okun - 0.19%. Hasil ini dikonfirmasi melalui Model regresi linier Bayesian (-0,21%); 3) Perkiraan nilai koefisien Okun (-0,2%) jauh lebih berkurang, dalam arti absolut, daripada Okun standar koefisien -0,30%; 4) hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi tingkat kekakuan tertentu dari pasar tenaga kerja di Aljazair, khususnya; 5) peningkatan tenaga kerja kondisi pasar di Aljazair bisa berdampak signifikan dalam mengurangi pengangguran baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ball, Leigh and Loungani, (2013) dalam upaya mencari tahu bagaimana hukum Okun cocok untuk pergerakan pengangguran jangka pendek di AS dan 20 negara maju menemukan bahwa pergeseran dalam permintaan agregat menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam output. Dalam dengan cara yang sama, Lancaster and Tulip (2015) menggunakan kerangka hukum Okun untuk memprediksi perubahan tingkat pengangguran untuk ekonomi Australia. Temuan itu diperlihatkan bahwa hukum memberikan gambaran yang berguna tentang perilaku perekonomian.

Li *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa di Cina hampir semua anak mulai dari tingkat sekolah dasar dan menengah diberikan pendidikan yang memadai, dengan matematika dasar dan keterampilan bahasa serta pelatihan dengan tujuan membangun kapasitas besar dengan upah rendah, tenaga kerja berketerampilan

rendah kekuatan yang dibutuhkan untuk sektor manufaktur, yang telah mendorong pertumbuhan China dari 1980-an hingga awal 2000-an. Tapi tenaga kerja ini tidak bisa dianggap sebagai sumber daya manusia karena kurangnya keterampilan tinggi dan bakat inovatif. Sehingga disarankan untuk lebih menekankan pada investasi dalam modal manusia yang mereka pertimbangkan sebagai pendorong yang lebih signifikan bagi pertumbuhan masa depan Cina.

Infrastruktur memiliki peran yang vital dalam pembangunan manusia, Mohanty, Nayak and Chatterjee (2016), meneliti apakah Infrastruktur memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia di 30 distrik Odisha, dari hasil studinya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pengembangan infrastruktur terhadap pembangunan manusia di Odisha. Di samping itu menguji dampak indeks infrastruktur komposit dan komponen individu pada pembangunan manusia dan tiga dimensinya. Studi ini membangun hubungan erat antara infrastruktur dan pembangunan manusia. Telekomunikasi, layanan pos, listrik desa, perbankan, sekolah, PTR dan air minum fasilitas memainkan peran penting dalam proses mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Dengan demikian, Untuk mencapai tinggi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, negara perlu memprioritaskan upayanya menuju penciptaan infrastruktur.

Carvalho, Nepal and Jamasb (2015), mempelajari dampak reformasi kelembagaan dan infrastruktur tingkat makro pada dimensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan dari kesejahteraan manusia di 25 negara transisi di Eropa Tengah dan Timur, menggunakan ekonometrik data panel berdasarkan teknik LSDVC untuk menganalisis efek reformasi berorientasi pasar pada indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai ukuran kesejahteraan manusia, dari tahun 1992 hingga 2007. Hasilnya

menunjukkan kompleksitas dampak reformasi di negara transisi. Mereka menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan ekonomi membawa dampak ekonomi positif dan dampak signifikan pada dimensi lain dari pembangunan manusia. Kami menemukan beberapa dampak ekonomi positif dari reformasi sektor infrastruktur. Namun, tidak semua langkah reformasi menghasilkan dampak positif. Privatisasi skala besar menunjukkan efek negatif pada hasil kesehatan dan ekonomi. Hasil keseluruhan menunjukkan pentingnya interaksi di antara langkah-langkah reformasi yang berbeda dan efek gabungannya pada pembangunan manusia.

Iheoma (2014) memeriksa apakah pengeluaran sosial mampu memastikan manusia pengembangan untuk negara-negara Afrika sub-Sahara tertentu dalam kerangka data panel. Hasil menunjukkan bahwa hanya belanja kesehatan masyarakat dan pendidikan tinggi penting dalam menjelaskan pembangunan manusia di negara-negara ini. Di tempat lain studi, Edeme (2014) menganalisis efek belanja publik sektoral pada manusia pembangunan di Nigeria menggunakan data panel dari 20 negara bagian selama periode 1999–2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan fungsional yang positif antara berbagai bentuk belanja sosial dan belanja pembangunan pedesaan dan manusia pengembangan. Razmi, Abbasian, and Mohammadi (2012) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan pemerintah dan HDI. Edeme (2017) menemukan bahwa di Nigeria, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan pedesaan memiliki dampak marjinal yang positif pada pembangunan manusia.

Namun berbeda dengan Haque and Khan (2019) menemukan hubungan yang signifikan dan negatif untuk pengeluaran kesehatan dengan HDI. Hasil ini dapat

dijelaskan dengan mengacu pada studi terkait bidang kesehatan di Arab Saudi. Sebaiknya (2001) menemukan bahwa beberapa hal penting seperti "perencanaan yang efektif, pemantauan, dan penilaian sistematis, pelatihan staf dan peningkatan dalam layanan pencegahan" tidak melingkupi peningkatan pengeluaran kesehatan. Demikian pula, Jannadi et al. (2008) mengidentifikasi beberapa masalah yang akan datang di sektor kesehatan yaitu, pelatihan profesional lokal, ketergantungan pada profesional ekspatriat, dan penyelarasan layanan kesehatan dengan perubahan dalam demografi dan pola penyakit. Watson dkk. (2008) menyimpulkan bahwa ada layanan kesehatan gratis untuk semua orang Saudi dan ini meningkatkan volume dan intensitas layanan karena konsumen menuntut tingkat perawatan maksimal yang tidak disertai dengan dampak keuangan apa pun dan ini meningkatkan biaya keseluruhan.

Patel and Annapoorna (2019), dengan menggunakan metode deskriptif dan analitik digunakan untuk studi hubungan antara pengeluaran Pendidikan Publik dan Sumber Daya Manusia Pembangunan India dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui reliabel sumber seperti Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Manusia laporan yang diterbitkan oleh UNDP. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap pembangunan manusia di India.

Mayanja Lwanga and Mawejeje (2014), menjelaskan bahwa pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas dalam perekonomian jika ia membelanjakan lebih banyak pada pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan tetapi akan dianggap boros jika pengeluaran pemerintah dipusatkan pada perjalanan yang berlebihan dan partisipasi konferensi oleh pejabat pemerintah yang biasanya terjadi di sebagian besar parastatal

pemerintah di Nigeria. Ini tidak akan menghasilkan percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, terutama untuk negara berkembang seperti Nigeria karena itu, pemerintah dihadapkan dengan tugas mengalokasikan pengeluaran dengan tepat ke berbagai segmen ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan.

Widodo *et al.*, (2019), menguji pengaruh tiga faktor yaitu pengeluaran pemerintah pendidikan, kesehatan, dan upah minimum pada indeks pembangunan manusia di lima provinsi terpilih Indonesia. Metode analisisnya adalah analisis berbasis data Panel yang mencakup periode waktu tahun 2007 hingga 2016. Studi ini difokuskan pada lima provinsi terpilih di Indonesia termasuk Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Hasilnya menunjukkan itu Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan membawa dampak positif namun tidak signifikan bagi manusia indeks pembangunan sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Maqin dan Sidharta (2017), menjelaskan bahwa bahwa ada korelasi positif antara PDB dengan pembangunan manusia dan konsumsi listrik di Indonesia. Kusharjanto dan Kim (2011) yang melakukan penelitian mengenai hubungan infrastruktur dan IPM di Pulau Jawa, menyimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur dasar berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Ranis, Gustav; Stewart, Frances and Ramires (2000); Khodabakhshi (2011) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia.

Febriarta and Sutrisna (2020), menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota/Kabupaten Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah infrastruktur dan pendidikan berpengaruh

positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja pemerintah infrastruktur dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja pemerintah pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memediasi efek pengeluaran pemerintah infrastruktur dan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh belanja pemerintah kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Mardiana, Militina and Utary (2018), menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2015, dengan menggunakan analisis jalur (*path analisis*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, pengeluaran sektor pendidikan dan infrastruktur berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka sedangkan pengeluaran kesehatan berpengaruh langsung negatif dan tidak signifikan. Dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan bidang infrastruktur dan pengangguran terbuka berpengaruh langsung dan tidak signifikan, Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung.

Sulistiyowati (2014), dengan menggunakan pendekatan ekonometrika dalam persamaan simultan *Two Stage Least Square* untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral dan kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada semua sektor dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan peningkatan pengeluaran infrastruktur paling besar pengaruhnya dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri dan pertanian.

Sulistiawati (2012), menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja daya serap dan kesejahteraan sosial provinsi di Indonesia Tahun 2006 sampai dengan 2010. Diperoleh hasil sebagai berikut: *Pertama*, investasi mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. *Kelima*, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.